



LAPORAN RAPAT EVALUASI TRIWULAN I DAN TRIWULAN II TAHUN 2025

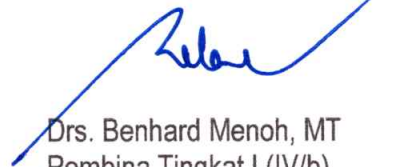
BADAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI NTT



KATA PENGANTAR

Puji Syukur patut kita Panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya, kami dapat menyelesaikan Laporan Rapat Evaluasi Triwulan I dan Triwulan II dengan baik. Adapun maksud penyusunan laporan ini adalah memberikan informasi kinerja periode Triwulan I dan Triwulan II Tahun 2025. Informasi tersebut berupa capaian Program, Kegiatan, maupun Sub Kegiatan serta anggaran. Kami berharap laporan ini dapat memberikan wawasan yang berguna bagi pihak-pihak yang terlibat. Besar harapan Kami hasil evaluasi yang membangun agar Pelaporan Kinerja Kami menjadi lebih baik di triwulan – triwulan berikutnya.

9 Kepala Badan Keuangan Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur, 4



Drs. Benhard Menoh, MT
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19720512 199101 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 mengenai Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Badan Keuangan Daerah ditetapkan sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan yang menjadi kewenangan daerah.

Dalam menjalankan peran strategis tersebut, Badan Keuangan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Struktur ini menegaskan pentingnya peran Badan Keuangan Daerah dalam mendukung sistem pemerintahan daerah, khususnya dalam aspek pengelolaan keuangan yang efisien dan akuntabel.

Sebagai pelaksana fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang keuangan, Gubernur melalui Badan Keuangan Daerah menyelenggarakan berbagai tugas dan fungsi teknis yang bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang efisien, transparan, dan akuntabel. Adapun tugas dan fungsi dimaksud meliputi:

1. Penyusunan kebijakan teknis di bidang keuangan daerah;
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang keuangan daerah;
3. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang keuangan daerah;
4. Pembinaan teknis terhadap penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang keuangan daerah; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dengan kedudukan, tugas pokok, dan fungsi tersebut, Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki peran penting dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang baik (good governance) serta pengelolaan keuangan yang profesional, efisien, dan akuntabel.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya secara optimal, Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Tahun Anggaran 2025 telah

menetapkan berbagai program dan kegiatan. Pelaksanaan program/kegiatan tersebut bertujuan untuk mendukung pencapaian target pembangunan daerah, khususnya pada aspek pengelolaan keuangan dan peningkatan pelayanan publik di bidang keuangan.

Sebagai bentuk akuntabilitas dan pertanggungjawaban pelaksanaan program/kegiatan, Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur menyelenggarakan Rapat Evaluasi Kinerja Triwulan I dan Triwulan II Tahun 2025. Tujuan utama dari rapat ini adalah:

1. Melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap realisasi program dan kegiatan yang telah dilaksanakan;
2. Mengidentifikasi permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan;
3. Memberikan solusi dan rekomendasi untuk percepatan pelaksanaan kegiatan pada triwulan berikutnya;
4. Menilai capaian kinerja berdasarkan indikator output dan outcome yang telah ditetapkan.

Dengan adanya evaluasi Triwulan ini, diharapkan seluruh perangkat kerja dalam lingkup Badan Keuangan Daerah dapat bekerja secara terarah, terukur, dan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah, serta mendukung tercapainya tujuan pembangunan daerah yang efektif dan berkelanjutan.

B. DASAR HUKUM

- a. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- e. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 Nomor 006, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0130);
- f. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 95 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 Nomor 095);
- g. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.03.0000/001/2025, tanggal 12 Juni 2025.

C. TUJUAN

Tujuan pelaksanaan rapat yaitu pemantauan, evaluasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang telah dilaksanakan periode Triwulan I dan Triwulan II Tahun 2025, selain itu tujuan dari dilakukan monitoring dan evaluasi kinerja dan anggran bertujuan untuk:

- 1. Sebagai bentuk komitmen Pimpinan untuk memastikan bahwa setiap indikator kinerja dapat dicapai secara efektif dan terukur,
- 2. Untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan setiap indikator kinerja yang ditetapkan,
- 3. Untuk mengetahui apakah rencana kerja dan anggaran Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT berjalan efektif sesuai dengan target yang telah ditetapkan,
- 4. Sebagai bentuk pengendalian dan kontrol terhadap pencapaian tujuan dan sasaran.

D. HASIL YANG DIHARAPKAN

Hasil yang diharapkan dari pelaksanaan rapat pembahasan kinerja yaitu pelaksanaan program/ kegiatan dapat terarah, tepat dan diharapkan mampu menghasilkan langkah yang

tepat dalam pengolahan serta pemanfaatan pengalokasian anggaran di berbagai segmen kegiatan Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT, serta memperoleh tingkat capaian kinerja yang telah ditetapkan.

E. PEMBIAYAAN

Pembiayaan pelaksanaan kegiatan ini bersumber dari APBD Provinsi NTT TA.2025 pada DPA Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT Tahun Anggaran 2025.

BAB II

PELAKSANAAN KEGIATAN

A. PESERTA RAPAT

Peserta rapat pembahasan rapat kinerja triwulan Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT Tahun 2025 melibatkan masing-masing unit kerja pada Badan Keuangan Daerah yang terdiri dari:

1. Plt. Kepala Badan
2. Plt. Sekretaris Badan
3. Kepala Bidang
4. Kepala Sub Bidang
5. Kepala Sub Bagian
6. JFT
7. Pelaksana

B. TEMPAT DAN WAKTU PELAKSANAAN

Rapat pembahasan kinerja Triwulan I dan Triwulan II Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT Tahun 2025 dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2025 yang bertempat di Ruang Rapat Lantai 1 Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT.

C. METODE PELAKSANAAN

Metode yang digunakan adalah berupa pemaparan realisasi dari masing – masing bidang, diskusi untuk memperoleh solusi dan upaya pemecahan permasalahan yang ada.

D. PEMBAHASAN DALAM RAPAT

Dalam pelaksanaan rapat ini dipimpin oleh Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT, dimana pelaksanaan rapat memaparkan beberapa pokok pembahasan yakni:

- ❖ Realisasi APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur
- ❖ Laporan Realisasi dan Capaian Kinerja Badan Keuangan Daerah
- ❖ Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT Tahun 2025 – 2029
- ❖ Rencana Kerja Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT Tahun 2026
- ❖ Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT

(Notulen rapat terlampir)

BAB III

PENUTUP

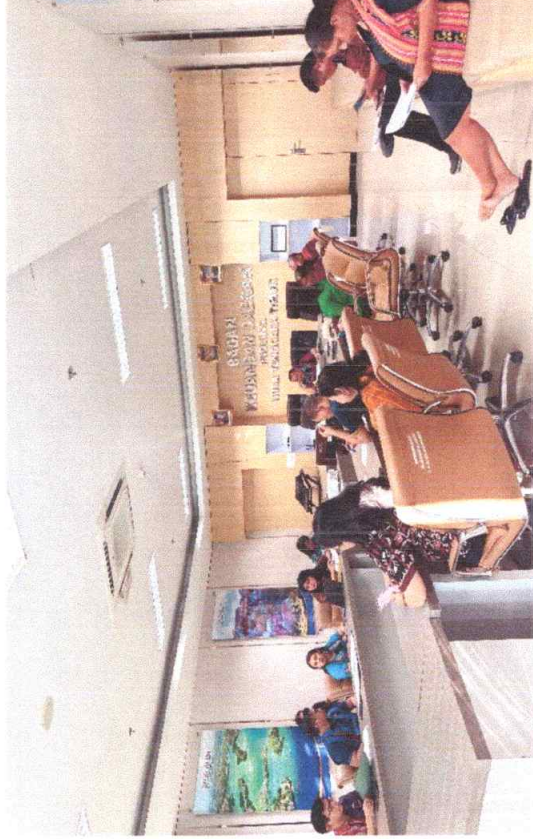
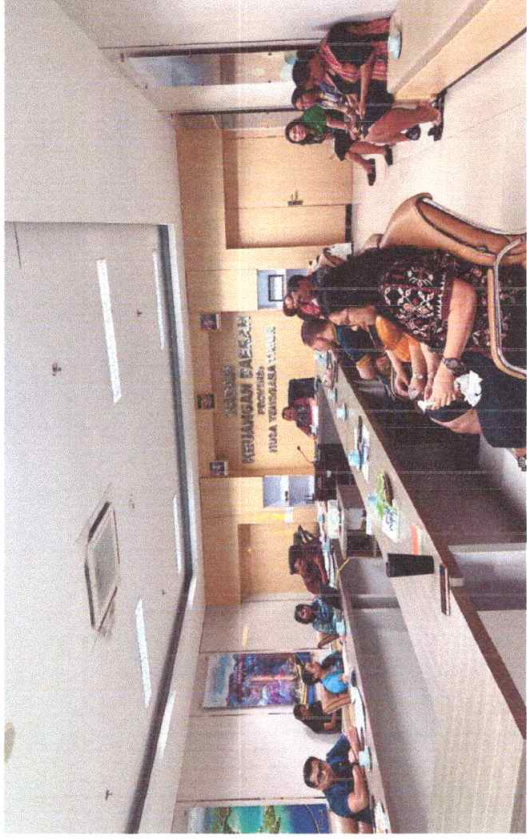
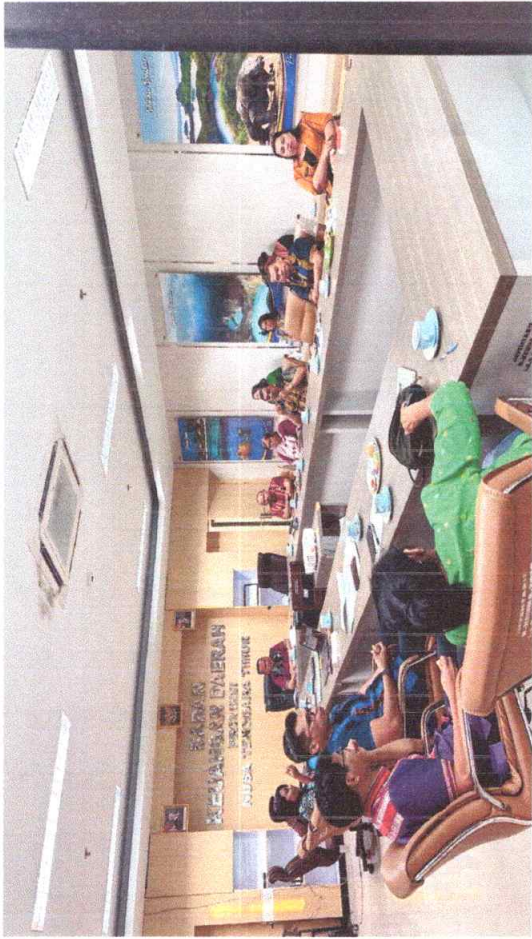
Rapat pembahasan ini dilakukan untuk pemantauan, evaluasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan program/ kegiatan yang telah dilaksanakan Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT Triwulan I dan Triwulan II Tahun Anggaran 2025. Pelaksanaan rapat diharapkan mampu menghasilkan langkah yang tepat dalam pengolahan serta pemanfaatan pengalokasian anggaran di berbagai segmen kegiatan Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT, serta memperoleh tingkat capaian kinerja yang telah ditetapkan.

Demikian laporan ini disampaikan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan.

4 Kepala Badan Keuangan Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur, 


Drs. Benhard Menoh, MT
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19720512 199101 1 001

LAMPIRAN





Yth : - Plt. Sekretaris
- Plt. Kabid Perbendaharaan
- Plt. Kabid Anggaran
- Kabid Akuntansi dan Pelaporan
- Plt. Kabid Pembinaan Keuangan Kabupaten/Kota
Dari : Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT
Tembusan : -
Tanggal : 09 Juli 2024
Nomor : 000.1.5/1414/BKUD1.2
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Rapat Evaluasi Kinerja Triwulan Badan Keuangan Daerah

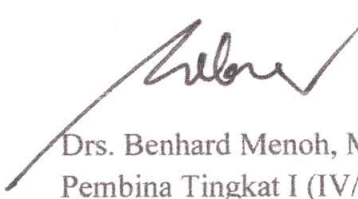
----- ISI NOTA DINAS -----

Dalam rangka pelaksanaan Evaluasi Kinerja dan Pemantauan Tingkat Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT Triwulan I dan Triwulan II, maka disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

- Diminta kehadiran dalam rapat dimaksud yang akan dilaksanakan pada :
Hari/Tanggal : Kamis, 10 Juli 2025
Waktu : 16.00 WITA s/d selesai
Tempat : Ruang Rapat Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT (Lantai dasar)
- Mengikutsertakan para Pejabat Pengawas dan Pejabat Fungsional pada rapat dimaksud.

Demikian untuk maklum, atas perhatian dan kehadirannya disampaikan terima kasih.

Kepala Badan Keuangan Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur,


Drs. Benhard Menoh, MT
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19720512 199101 1 001

Paraf Hirarki	
PLt. Sekretaris Badan	
Perencana Ahli Muda	
Pranata Komputer Ahli Pertama	

REALISASI ANGGARAN TRIWULAN I BADAN KEUANGAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025

NO						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi	%
						KEUANGAN	781.634.764.109	1.927.790.158	0,25%
0	0	0	2			Badan Keuangan Daerah	781.634.764.109	1.927.790.158	0,25%
0	1					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	18.188.331.972	711.435.185	3,91%
1	1	0	1			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	409.894.096	66.797.000	16,30 %
1	1	0	1	0	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	65.246.000	30.454.000	46,68 %
1	1	0	1	0	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	91.310.800		0,00%
1	1	0	1	0	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	76.903.727	36.343.000	47,26 %
1	1	0	1	0	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	76.433.569		0,00%
1	1	0	1	0	8	Pelaksanaan pengumpulan data statistik sektoral daerah	50.000.000		0,00%
1	1	0	1	0	10	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	50.000.000		0,00%
1	1	0	2			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.562.328.600	97.908.200	0,85%
1	1	0	2	0	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.070.629.000		0,00%
1	1	0	2	0	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2.023.606.600		0,00%
1	1	0	2	0	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	150.000.000	21.939.000	14,63 %

NO						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi	%
1	1	0	2	0	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	75.330.000		0,00%
1	1	0	2	0	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	55.423.000	37.561.000	67,77 %
1	1	0	2	0	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	65.519.000	38.408.200	58,62 %
1	1	0	2	0	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	75.509.000		0,00%
1	1	0	2	0	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	46.312.000		0,00%
1	1	0	3			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	20.000.000	4.264.000	21,32 %
1	1	0	3	0	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	10.000.000		0,00%
1	1	0	3	0	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	10.000.000	4.264.000	42,64 %
1	1	0	5			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	335.843.000	46.808.860	13,94 %
1	1	0	5	0	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	141.079.000	41.014.660	29,07 %
1	1	0	5	0	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	91.079.000	5.794.200	6,36%
1	1	0	5	0	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	50.000.000		0,00%
1	1	0	5	0	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	53.685.000		0,00%

NO						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi	%
1	1	0	6			Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.600.775.956	301.253.046	18,82 %
1	1	0	6	0	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	41.079.000	300.000	0,73%
1	1	0	6	0	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	26.189.000	56.000	0,21%
1	1	0	6	0	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	355.243.520	62.424.207	17,57 %
1	1	0	6	0	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	72.500.000	9.980.000	13,77 %
1	1	0	6	0	7	Penyediaan Bahan/Material	200.000.000	69.591.444	34,80 %
1	1	0	6	0	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	454.729.000	96.246.495	21,17 %
1	1	0	6	0	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	419.129.000	62.654.900	14,95 %
1	1	0	6	0	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	31.906.436		0,00%
1	1	0	7			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	234.824.000		0,00%
1	1	0	7	0	5	Pengadaan Mebel	38.824.000		0,00%
1	1	0	7	0	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	196.000.000		0,00%
1	1	0	8			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.723.846.320	128.629.800	3,45%
1	1	0	8	0	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	36.565.400	629.800	1,72%
1	1	0	8	0	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	780.000.000	125.000.000	16,03 %
1	1	0	8	0	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.907.280.920	3.000.000	0,10%

NO						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi	%
1	1	0	9			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	300.820.000	65.774.279	21,86 %
1	1	0	9	0	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	236.820.000	55.279.979	23,34 %
1	1	0	9	0	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	44.000.000	10.494.300	23,85 %
1	1	0	9	0	7	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	20.000.000		0,00%
0	2					PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	763.446.432.137	1.216.354.973	0,16%
2	2	0	1			Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	11.036.154.325	521.535.736	4,73%
2	2	0	1	0	1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	473.651.000		0,00%
2	2	0	1	0	2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	516.447.000		0,00%
2	2	0	1	0	5	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD	159.014.000	96.189.100	60,49 %
2	2	0	1	0	6	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	367.722.800		0,00%
2	2	0	1	0	7	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	3.049.323.362		0,00%
2	2	0	1	0	8	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah	3.025.873.200	376.846.636	12,45 %

NO						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi	%
						tentang Penjabaran Perubahan APBD			
2	2	0	1	0	9	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	3.444.122.963	48.500.000	1,41%
2	2	0	2			Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	2.272.027.005	57.634.000	2,54%
2	2	0	2	0	1	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota	1.000.000		0,00%
2	2	0	2	0	2	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	434.038.000		0,00%
2	2	0	2	0	3	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	435.568.000		0,00%
2	2	0	2	0	4	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	452.694.000		0,00%

NO						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi	%
2	2	0	2	0	5	Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	732.006.500	5.279.000	0,72%
2	2	0	2	0	6	sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah	1.000.000		0,00%
2	2	0	2	0	7	Asistensi Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	110.170.000	25.280.000	22,95 %
2	2	0	2	0	8	Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	1.000.000		0,00%
2	2	0	2	0	9	Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	1.000.000		0,00%
2	2	0	2	0	10	Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	1.000.000		0,00%

NO						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi	%
2	2	0	2	0	1 1	Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	1.000.000		0,00%
2	2	0	2	0	1 2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintah Daerah	101.550.505	27.075.000	26,66 %
2	2	0	3			Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	2.382.903.796	237.081.255	9,95%
2	2	0	3	0	1	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	433.044.296	88.542.380	20,45 %
2	2	0	3	0	3	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	322.607.600		0,00%
2	2	0	3	0	5	Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	404.848.400		0,00%
2	2	0	3	0	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	631.832.200	148.538.875	23,51 %

NO							Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi	%
2	2	0	3	0	8		Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	589.571.300		0,00%
2	2	0	3	0	10		Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	1.000.000		0,00%
2	2	0	4				Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	2.671.638.502	400.103.982	14,98 %
2	2	0	4	0	1		Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	1.000.000		0,00%
2	2	0	4	0	2		Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	330.735.212	48.309.000	14,61 %
2	2	0	4	0	3		Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	560.726.990	153.313.000	27,34 %
2	2	0	4	0	4		konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	770.670.000	198.481.982	25,75 %

NO						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi	%
2	2	0	4	0	5	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	1.006.506.300		0,00%
2	2	0	4	0	9	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1.000.000		0,00%
2	2	0	4	0	11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	1.000.000		0,00%
2	2	0	5			Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	745.083.708.509		0,00%
2	2	0	5	0	4	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	47.206.923.484		0,00%
2	2	0	5	0	8	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	46.356.898.400		0,00%
2	2	0	5	0	9	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	22.180.954.686		0,00%
2	2	0	5	0	10	Pengelolaan Dana bagi Hasil Provinsi	629.338.931.939		0,00%

Evaluasi Kinerja Berdasarkan Realisasi Tiga Tahun Terakhir

			2023			2024			2025		
			Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
5	2	1	3	-	-	38.639.000,00	30.985.300,00	80,19	10.000.000,00	4.264.000,00	42,64
			5								
5	2	1	5	93.473.000,00	99,91	312.158.000,00	238.467.700,00	76,39	232.158.000,00	74.638.203,00	32,15
5	2	1	5	93.473.000,00	99,91	161.079.000,00	148.770.800,00	92,36	141.079.000,00	61.735.823,00	43,76
5	2	1	5	-	-	91.079.000,00	84.526.900,00	92,81	91.079.000,00	12.902.380,00	14,17
5	2	1	5	-	-	30.000.000,00	5.170.000,00	17,23	-	-	#DIV/0!
5	2	1	5	-	-	30.000.000,00	-	-	-	-	#DIV/0!
5	2	1	6	1.063.444.534,00	98,19	2.190.365.955,00	1.818.328.905,00	83,01	1.455.980.242,00	645.270.015,00	44,32
5	2	1	6	-	-	78.037.000,00	70.550.000,00	90,41	27.709.000,00	500.000,00	1,80
5	2	1	6	-	-	56.189.000,00	30.290.250,00	53,91	26.189.000,00	1.163.239,00	4,40
5	2	1	6	180.085.880,00	100,00	335.243.520,00	265.186.100,00	74,65	355.243.520,00	147.337.376,00	41,48
5	2	1	6	70.450.200,00	82,30	72.500.000,00	49.630.000,00	68,46	52.500.000,00	24.650.000,00	46,95
5	2	1	6	192.606.600,00	99,89	432.460.000,00	298.341.234,00	68,99	200.000.000,00	120.003.250,00	60,00
5	2	1	6	274.873.512,00	99,84	480.829.000,00	431.531.626,00	89,75	424.792.266,00	258.071.180,00	60,75
5	2	1	6	365.000.000,00	98,24	658.241.000,00	647.819.695,00	98,42	337.640.000,00	93.554.970,00	27,71
5	2	1	6	-	-	56.886.436,00	24.980.000,00	43,91	31.906.436,00	-	0,00
5	2	1	7	120.764.400,00	99,55	501.611.131,00	472.641.675,00	94,22	1.040.679.000,00	214.619.315,00	20,62
5	2	1	7	-	-	9.706.000,00	5.062.500,00	52,16	38.824.000,00	4.056.200,00	10,45
5	2	1	7	120.764.400,00	99,55	491.905.131,00	467.579.175,00	95,05	501.855.000,00	210.563.115,00	41,96
5	2	1	7	-	-	-	-	-	500.000.000,00	-	0,00
5	2	1	8	3.831.375.660,00	98,84	3.712.245.912,00	3.500.950.459,00	94,31	3.671.463.884,00	1.537.511.380,00	41,88
5	2	1	8	36.565.400,00	48,08	36.565.400,00	32.148.539,00	87,92	34.565.400,00	10.074.500,00	29,15
5	2	1	8	750.000.000,00	100,00	775.000.000,00	750.000.000,00	96,77	750.000.000,00	312.500.000,00	41,67
5	2	1	8	3.044.810.460,00	99,16	2.900.680.512,00	2.718.801.920,00	93,73	2.886.898.464,00	1.214.936.880,00	42,08

Evaluasi Kinerja Berdasarkan Realisasi Tiga Tahun Terakhir

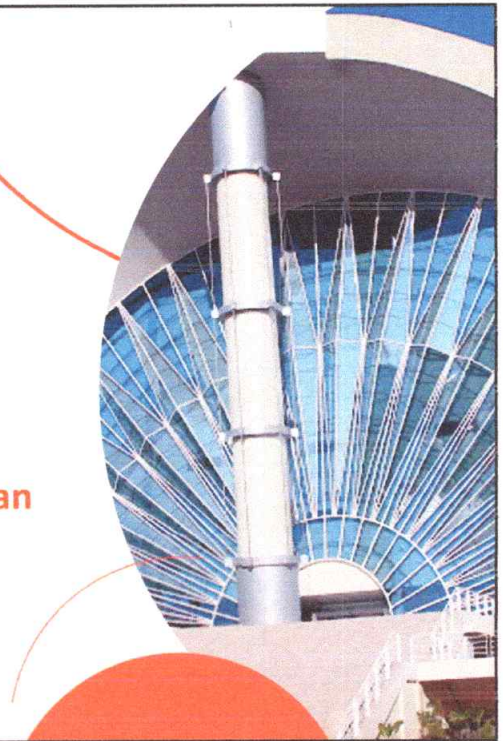
				2023			2024			2025		
Program/ Kegiatan Sub Kegiatan				Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
5	2	2	1	2	3	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	486.866.900,00	486.547.270,00	99,93	513.568.000,00	500.405.750,00	97,44
										407.968.000,00	-	0,00
						Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	489.866.400,00	486.110.280,00	99,23	442.494.000,00	437.417.650,00	98,85
5	2	2	1	2	4					484.694.000,00	14.678.100,00	3,03
5	2	2	1	2	5	Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	754.797.000,00	736.612.616,00	97,59	728.977.500,00	557.863.186,00	76,53
5	2	2	1	2	7	Asistensi Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	78.492.500,00	69.647.642,00	88,60	116.169.000,00	90.790.730,00	78,15
5	2	2	1	2	12	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah daerah Konsolidasi Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintah Daerah	25.000.000,00	23.767.000,00	95,07	101.550.505,00	88.039.000,00	86,69
5	2	2	1	3	3	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	1.907.327.688,00	1.862.523.496,00	98,70	2.400.003.796,00	2.271.130.421,00	94,63
5	2	2	1	3	1	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	455.918.500,00	454.350.100,00	99,66	424.559.766,00	369.045.504,00	93,99
5	2	2	1	3	3	Penyusunan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	243.660.100,00	243.275.280,00	99,84	332.083.000,00	321.713.136,00	96,88
5	2	2	1	3	5	Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	384.874.696,00	375.200.600,00	97,49	385.216.000,00	365.721.390,00	94,94
5	2	2	1	3	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyatoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	226.999.696,00	219.658.873,00	96,77	665.180.000,00	619.716.090,00	93,17
5	2	2	1	3	8	Koordinasi Pelaksanaan Putang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	595.874.696,00	590.038.645,00	99,02	592.965.000,00	564.934.296,00	95,27
										344.711.300,00	48.600.000,00	14,10

Evaluasi Kinerja Berdasarkan Realisasi Tiga Tahun Terakhir

			2023			2024			2025		
			Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
5	2	1	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah			2.581.978.397,00	97,35	2.865.638.502,00	2.695.141.308,00	94,05
											24,44
5	2	1	4	1	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan kas dan Pengeluaran Kas Daerah	95.676.000,00	100,00	-	-	-	0,00
5	2	1	4	2	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	-	#DIV/0!	335.633.134,00	323.085.212,00	165.079.790,00	51,09
5	2	1	4	3	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	484.776.602,00	96,53	577.258.990,00	675.930.891,00	154.840.200,00	22,91
5	2	1	4	4	konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	-	#DIV/0!	771.843.000,00	635.935.249,00	358.458.692,00	56,37
5	2	1	4	5	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	2.071.722.100,00	97,42	1.165.911.532,00	1.140.456.300,00	-	0,00
5	2	1	5	5	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	729.392.501.265,00	98,34	899.663.036.725,00	750.299.842.087,00	189.787.520.483,00	25,29
5	2	1	5	4	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	63.374.211.388,00	99,23	57.933.263.642,00	47.206.923.484,00	27.475.888.429,00	58,20
5	2	1	5	8	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	5.424.756.000,00	-	9.372.905.000,00	36.691.308.847,00	-	0,00
5	2	1	5	9	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	11.055.939.527,00	7,98	48.448.306.001,00	13.149.302.896,00	725.197.800,00	5,52
5	2	1	5	10	Pengelolaan Dana bagi Hasil Provinsi	649.537.594.350,00	100,61	783.908.562.082,00	653.252.306.860,00	161.586.434.254,00	24,74
5	2	3			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1.438.336.320,00	94,95	-	-	-	-
5	2	3	1	1	Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.438.336.320,00	94,95	-	-	-	-
5	2	3	1	1	Penyusunan Standar Harga	1.438.336.320,00	94,95	-	-	-	-

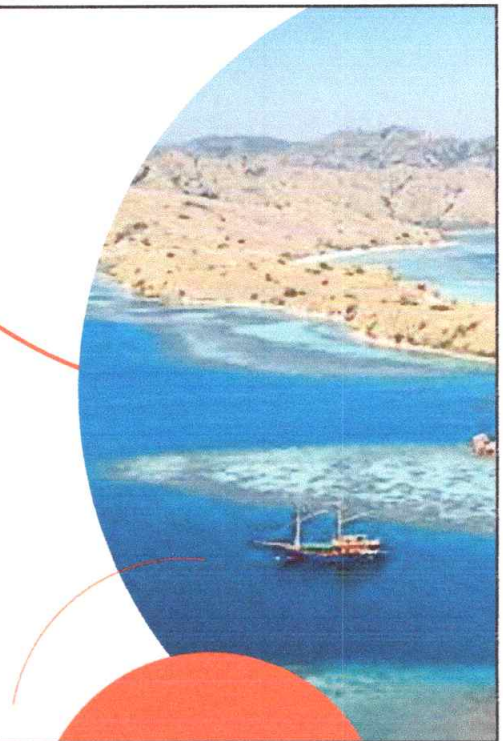
**Rapat Evaluasi Kinerja Triwulan II
BADAN KEUANGAN DAERAH TA. 2025
dan
Pembahasan Dokumen Perencanaan Badan
Keuangan Daerah
Tahun 2026**

Disampaikan oleh :
Kepala Badan Keuangan Daerah
Kamis, 10 Juli 2025



TOPIK

1. LRA APBD
2. LRA BKEUDA
3. CAPAIAN KINERJA BKEUDA
4. EVALUASI KINERJA BAKEUDA
BERDASARKAN REALISASI 3
TAHUN TERAKHIR
5. RENJA BKEUDA TAHUN 2026
6. RKBMD BADAN KEUANGAN
DAERAH



REALISASI APBD PROVINSI NTT TA. 2025
(1 Januari s.d. 30 Juni 2025)



REALISASI APBD PROVINSI NTT TA 2025
(Kondisi 1 Januari – 30 Juni 2025)

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
4	PENDAPATAN DAERAH	5.219.986.855.755,00	2.213.528.999.160,34	42,40%
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.923.350.420.755,00	748.190.904.495,34	38,90%
4.1.01	Pajak Daerah	1.567.588.247.801,00	439.270.398.587,64	28,02%
4.1.02	Retribusi Daerah	218.587.260.975,00	53.606.157.809,76	24,52%
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	62.519.178.857,00	38.737.314.988,00	61,96%
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	74.655.733.122,00	216.577.033.109,94	290,10%
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	3.296.636.435.000,00	1.464.723.846.165,00	44,43%
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3.296.636.435.000,00	1.464.723.846.165,00	44,43%
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		614.248.500,00	
4.3.01	Pendapatan Hibah		614.248.500,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	5.219.986.855.755,00	2.213.528.999.160,34	42,40%

Lanjutan...



NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
5	BELANJA	5.056.507.288.791,00	1.751.165.917.805,00	34,63%
05.01	BELANJA OPERASI	3.964.259.077.875,00	1.577.334.987.291,00	39,79%
05.01.01	Belanja Pegawai	2.434.609.539.949,00	996.297.087.536,00	40,92%
05.01.02	Belanja Barang dan Jasa	942.887.980.442,00	469.614.882.286,00	49,81%
05.01.03	Belanja Bunga	47.206.923.484,00	27.475.888.429,00	58,20%
05.01.05	Belanja Hibah	529.694.634.000,00	83.477.129.040,00	15,76%
05.01.06	Belanja Bantuan Sosial	9.860.000.000,00	470.000.000,00	4,77%
05.02	BELANJA MODAL	400.871.425.891,00	11.519.298.460,00	2,87%
05.02.01	Belanja Modal Tanah	181.316.183.435,00	148.542.663.189,32	81,92%
05.02.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	54.366.315.333,00	7.434.004.904,00	13,67%
05.02.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	240.986.243.000,00	4.085.293.556,00	1,70%
05.02.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	99.017.331.408,00		
05.02.06	Belanja Modal Aset Lainnya	6.501.536.150,00		



Lanjutan...

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
05.03	BELANJA TIDAK TERDUGA	22.180.954.686,00	725.197.800,00	3,27%
05.03.01	Belanja Tidak Terduga	22.180.954.686,00	725.197.800,00	3,27%
05.04	BELANJA TRANSFER	669.195.830.339,00	161.586.434.254,00	24,15%
05.04.01	Belanja Bagi Hasil	629.338.931.939,00	161.586.434.254,00	25,68%
05.04.02	Belanja Bantuan Keuangan	39.856.898.400,00	0,00	0,00%
	JUMLAH BELANJA	5.056.507.288.791,00	1.751.165.917.805,00	34,63%
	TOTAL SURPLUS/(DEFISIT)	163.479.566.964,00	462.363.081.355,34	282,83%



#AKHLAK

ISO

Badan Keuangan Daerah

Lanjutan...

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
06.02	PENERIMAAN PEMBIAYAAN		262.829.210.192,37	
06.01.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		262.829.210.192,37	
06.02	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	163.479.566.964,00	92.920.066.253,00	56,84%
06.02.02	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	163.479.566.964,00	92.920.066.253,00	56,84%
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	163.479.566.964,00	92.920.066.253,00	99,76%
	Pembiayaan Netto	-163.479.566.964,00	169.909.143.939,37	(103,93%)
06.03	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan		632.272.225.294,71	

#AKHLAK

ISO

Badan Keuangan Daerah

#AKHLAK

ISO

Badan Keuangan Daerah

LRA BKEUDA

(1 Januari s.d. 30 Juni 2025)

>

NO.	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
	BADAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI	787.073.147.705,00	171.544.922.677,00	21,80%
01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	20.990.960.988,00	6.575.831.728,00	31,33%
01.1.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	422.994.096,00	139.119.316,00	32,89%
01.1.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13.840.365.766,00	3.840.255.495,00	27,75%
01.1.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	20.000.000,00	4.264.000,00	21,32%
01.1.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	232.158.000,00	74.638.203,00	32,15%
01.1.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.455.980.242,00	645.270.015,00	44,32%
01.1.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.040.679.000,00	214.619.315,00	20,62%
01.1.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.671.463.884,00	1.537.511.380,00	41,88%
01.1.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	287.320.000,00	120.154.004,00	41,82%
01.1.14.	Fasilitasi Keprotokolan	20.000.000,00	-	-

Lanjutan...

NO.	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
02.	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	766.082.186.717,00	192.444.979.378,00	25,12%
02.1.01.	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	9.117.716.177,00	1.123.188.327,00	12,32%
02.1.02.	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	2.035.277.005,00	305.510.650,00	15,01%
02.1.03.	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	1.853.943.796,00	550.381.236,00	29,69%
02.1.04.	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	2.775.407.652,00	678.378.682,00	24,44%
02.1.05.	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	750.299.842.087,00	189.787.520.483,00	25,29%

CAPAIAN KINERJA BADAN KEUANGAN DAERAH

3. REALISASI PROGRAM/KEGIATAN S.D. 30 JUNI 2025

NO.	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI
02.	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan Secara Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan Perundang-Undangan	100 %	37,19 %
02.1.01.	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah		100 %	22,56 %
02.1.02.	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota		100 %	36,33 %
02.1.03.	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah		100 %	49,99 %
02.1.04.	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah		100 %	40,27 %
02.1.05.	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah		100 %	36,84 %

Adapun realisasi per Sub Kegiatan dapat dijelaskan pada slide berikut:

3. CAPAIAN KINERJA S.D. 30 JUNI 2025

No	Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Tahun 2024		Capaian Kinerja (%)	Ket
			Target	Realisasi		
1	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS	2 Dokumen		22,56 %	
		Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	2 Dokumen	-	0 %	berproses mulai Juni hingga Juli
		Jumlah Dokumen DPA SKPD yang diverifikasi,	33 Dokumen	-	0 %	Dilaksanakan paling lambat minggu pertama bulan Agustus 2025
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD yang diverifikasi	39 Dokumen	0	0 %	jadwal pelaksanaan di Desember



Lanjutan...

3. CAPAIAN KINERJA S.D. 30 JUNI 2025

No	Program/ Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Tahun 2024		Capaian Kinerja (%)	Ket
			Target	Realisasi		
		Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	-	0 %	Jadwal Pelaksanaan pada bulan November - Desember 2025
		Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	-	0 %	
		Jumlah Dokumen Regulasi dan Kebijakan Anggaran	9 Dokumen	 Dokumen	 %	



Lanjutan...

3. REALISASI PROGRAM/KEGIATAN
S.D. 30 JUNI 2025

No	Program/ Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Tahun 2025		Capaian Kinerja (%)	Ket
			Target	Realisasi		
	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	44 Dokumen	-	0 %	Kegiatan ini akan dilaksanakan pada Bulan Oktober s/d Desember 2025 sesuai dengan tahapan dan jadwal Penyusunan APBD sesuai Permendagri 15/2024 ug Pedum Penyusunan APBD TA. 2025
		Jumlah Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	44 Dokumen	-	0 %	Kegiatan ini akan dilaksanakan pada Bulan Juli s/d Oktober 2025 sesuai Permendagri 15/2025
		Jumlah Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	44 Dokumen	8 Dokumen	18 %	Capaian Kinerja pada Sub Kegiatan ini baru 8 Dokumen untuk 4 Kabupaten yaitu Nagekeo, Mabar, Matim dan Sabu.
		Jumlah Laporan Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan	100 %	Selesai
		Jumlah BLUD yang diasistensi	17 Lembaga	17 Lembaga	100 %	Selesai
		Jumlah Dokumen Laporan Konsolidasi Laporan Keuangan Kabupaten/Kota dan Data Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	2 Dokumen	-	0 %	Sedang dalam proses



Lanjutan...

3. REALISASI PROGRAM/KEGIATAN
S.D. 30 JUNI 2025

No	Program/ Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Tahun 2025		Capaian Kinerja (%)	Ket
			Target	Realisasi		
	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	12 Dokumen	6 Dokumen	50 %	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	2 Dokumen	1 Dokumen + 2 Dokumen (karna terjadi Perubahan Anggaran)	100 %	
		Jumlah Laporan Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	3 Laporan	0 Laporan	0 %	DAK Tahap I belum ada Pengeluaran Dana
		Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	12 Laporan	7 Laporan	58,33 %	
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	12 Dokumen	5 Dokumen	41,66 %	



Lanjutan...

3. REALISASI PROGRAM/KEGIATAN
S.D. 30 JUNI 2025

No	Program/ Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Tahun 2025		Capaian Kinerja (%)	Ket
			Target	Realisasi		
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan - LO, dan Beban	1 Dokumen	Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan - LO, dan Beban setiap bulan	51,10 %	Berlangsung
		Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	3 Laporan	1 Laporan	25 %	Berlangsung
		Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD, dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	40 Laporan	30 LK PD 1 LK PEMDA 2 LK BLUD 4 LK BUMD	85 %	Berlangsung
		Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	2 Dokumen	0 Dokumen	0 %	



Lanjutan... 3. CAPAIAN KINERJA S.D. 30 DESEMBER

No	Program/ Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Tahun 2024		Capaian Kinerja (%)	Ket
			Target	Realisasi		
	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintahan Daerah	12 Dokumen	6 Dokumen	50 %	Dokumen disusun setiap bulan
		Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1 Dokumen	0 Dokumen	0 %	Dokumen disusun pada akhir tahun anggaran
		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	2 Dokumen	1 Dokumen	50 %	Dokumen disusun per Semester
		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	19 Dokumen	9 Dokumen	47,36 %	Dokumen disusun Bulanan, Trisulan, Semesteran dan Tahunan



EVALUASI KINERJA BAKEUDA BERDASARKAN
REALISASI BELANJA
3 TAHUN TERAKHIR

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Realisasi Tiga Tahun Terakhir								
		2023			2024			2025 (s/d 30 Juni 2025)		
		PAGU	REALISASI	%	PAGU	REALISASI	%	PAGU	REALISASI	%
	Badan Keuangan Daerah	759.550.043.640,00	746.146.749.741,00	98,24	935.572.568.569,00	768.589.304.915,00	82,15	787.073.147.705,00	199.020.811.106,00	25,29
	01.PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	14.014.276.952,00	13.312.945.336,00	95,00	17.320.377.116,00	16.105.448.226,00	92,99	20.990.960.988,00	6.575.831.728,00	31,33
01.1.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	217.435.900,00	206.511.700,00	94,98	375.298.517,00	349.203.449,00	93,05	422.994.096,00	139.119.316,00	32,89
01.1.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.354.756.600,00	7.729.393.983,00	92,51	9.747.739.600,00	9.325.367.877,00	95,67	13.840.365.766,00	3.840.255.495,00	27,75
01.1.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	5.000.000,00	4.863.000,00	97,26	104.718.000,00	82.059.300,00	78,36	20.000.000,00	4.264.000,00	21,32
01.1.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	93.473.000,00	93.391.100,00	99,91	312.158.000,00	238.467.700,00	76,39	232.158.000,00	74.638.203,00	32,15
01.1.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.083.016.192,00	1.063.444.534,00	98,19	2.190.385.956,00	1.818.328.905,00	83,01	1.455.980.242,00	645.270.015,00	44,32
01.1.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	120.764.400,00	120.222.811,00	99,55	501.611.131,00	472.641.675,00	94,22	1.040.679.000,00	214.619.315,00	20,62
01.1.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.831.375.860,00	3.786.867.560,00	98,84	3.712.245.912,00	3.500.950.459,00	94,31	3.671.463.884,00	1.537.511.380,00	41,88
01.1.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	308.455.000,00	308.250.648,00	99,93	376.220.000,00	318.428.861,00	84,64	287.320.000,00	120.154.004,00	41,82
01.1.14	Facilitas Keprotokolan	-	-	-	-	-	-	20.000.000,00	-	0,00

Lanjutan...

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	2023			2024			2025 (s/d 30 Juni 2025)		
		PAGU	REALISASI	%	PAGU	REALISASI	%	PAGU	REALISASI	%
02.	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	745.535.766.688,00	732.833.804.405,00	98,30	918.252.191.453,00	752.483.856.689,00	81,95	766.082.186.717,00	192.444.979.378,00	25,12
02.1.01.	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	9.200.234.333,00	8.744.406.704,00	95,05	10.961.715.425,00	9.620.616.800,00	87,77	9.117.716.177,00	1.123.188.327,00	12,32
02.1.02.	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	2.383.524.700,00	2.340.693.226,00	98,20	2.361.797.005,00	2.132.734.438,00	90,30	2.035.277.005,00	305.510.650,00	15,01
02.1.03.	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	1.907.327.688,00	1.882.523.498,00	98,70	2.400.003.796,00	2.271.130.421,00	94,63	1.853.943.796,00	550.381.236,00	29,69
02.1.04.	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	2.652.178.702,00	2.581.978.397,00	97,35	2.865.638.502,00	2.695.141.308,00	94,05	2.775.407.652,00	678.378.682,00	24,44
02.1.05.	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	729.392.501.265,00	717.284.202.580,00	98,34	899.663.036.725,00	735.764.233.722,00	81,78	750.299.842.087,00	189.787.520.483,00	25,29
03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1.438.336.320,00	1.365.698.375,00	94,95	-	-	-	-	-	-
03.1.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.438.336.320,00	1.365.698.375,00	94,95	-	-	-	-	-	-

#AKHLAK ISO Badan Keuangan Daerah

RENJA 2026

#AKHLAK ISO Badan Keuangan Daerah

> 21

RENJA BADAN KEUANGAN DAERAH 2026 (Tarikan data dari SIPD RI tanggal 10 Juli 2025)			
PD/Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Renja 2026	Rincian pada SIPD	Selisih
5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Keuangan Daerah	781.634.764.109,00	781.634.764.109,00	-
5.02 KEUANGAN	781.634.764.109,00	781.634.764.109,00	-
5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	763.446.432.137,00	763.446.432.137,00	-
5.02.02.1.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	11.036.154.325,00	11.036.154.325,00	-
5.02.02.1.01.0001 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	473.651.000,00	473.651.000,00	-
5.02.02.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	516.447.000,00	516.447.000,00	-
5.02.02.1.01.0005 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD	159.014.000,00	159.014.000,00	-
5.02.02.1.01.0006 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	367.722.800,00	367.722.800,00	-
5.02.02.1.01.0007 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	3.049.323.362,00	3.049.323.000,00	(362,00)
5.02.02.1.01.0008 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	3.025.873.200,00	3.025.873.000,00	(200,00)
5.02.02.1.01.0009 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	3.444.122.963,00	3.444.123.525,00	562,00

#AKHLAK ISO 9001 Badan Keuangan Daerah

Lanjutan...			
PD/Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Renja 2026	Rincian pada SIPD	Selisih
5.02.02.1.02 Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	2.272.027.005,00	2.272.027.005,00	-
5.02.02.1.02.0002 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	434.038.000,00	434.038.000,00	-
5.02.02.1.02.0003 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	435.568.000,00	435.568.000,00	-
5.02.02.1.02.0004 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	452.694.000,00	452.694.000,00	-
5.02.02.1.02.0005 Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	738.006.500,00	793.176.500,00	55.170.000,00
5.02.02.1.02.0007 Asistensi Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	110.170.000,00	55.000.000,00	(55.170.000,00)
5.02.02.1.02.0012 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	101.550.505,00	101.550.505,00	-

#AKHLAK ISO 9001 Badan Keuangan Daerah

Lanjutan...			
PD/Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Renja 2026	Rincian pada SIPD	Selisih
5.02.02.1.03 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	2.382.903.796,00	2.382.903.796,00	-
5.02.02.1.03.0001 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	433.044.296,00	433.044.296,00	-
5.02.02.1.03.0003 Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	322.607.600,00	356.782.500,00	34.174.900,00
5.02.02.1.03.0005 Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	404.848.400,00	404.848.400,00	-
5.02.02.1.03.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	632.832.200,00	598.657.300,00	(34.174.900,00)
5.02.02.1.03.0008 Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	589.571.300,00	589.571.300,00	-
25    Badan Keuangan Daerah			

Lanjutan...			
PD/Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Renja 2026	Rincian pada SIPD	Selisih
5.02.02.1.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	2.671.638.502,00	2.671.638.502,00	-
5.02.02.1.04.0002 Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	333.735.212,00	333.735.212,00	-
5.02.02.1.04.0003 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	560.726.990,00	560.726.990,00	-
5.02.02.1.04.0004 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	770.670.000,00	770.670.000,00	-
5.02.02.1.04.0005 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	1.006.506.300,00	1.006.506.300,00	-
26    Badan Keuangan Daerah			

Lanjutan...

PD/Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Renja 2026	Rincian pada SIPD	Selisih
5.02.02.1.05 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	745.083.708.509,00	47.206.923.484,00	(697.876.785.025,00)
5.02.02.1.05.0004 Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	47.206.923.484,00	47.206.923.484,00	-
5.02.02.1.05.0008 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	46.356.898.400,00	-	(46.356.898.400,00)
5.02.02.1.05.0009 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	22.180.954.686,00	-	(22.180.954.686,00)
5.02.02.1.05.0010 Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	629.338.931.939,00	-	(629.338.931.939,00)

Lanjutan...

PD/Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Renja 2026	Rincian pada SIPD	Selisih
5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	18.188.331.972,00	18.188.331.972,00	-
5.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	409.894.096,00	409.894.096,00	-
5.02.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	65.246.000,00	65.246.000,00	-
5.02.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	91.310.800,00	91.310.800,00	-
5.02.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	76.903.727,00	76.903.727,00	-
5.02.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	76.433.569,00	76.433.569,00	-
5.02.01.1.01.0008 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	50.000.000,00	50.000.000,00	-
5.02.01.1.01.0010 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	50.000.000,00	50.000.000,00	-

Lanjutan...			
PD/Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Renja 2026	Rincian pada SIPD	Selisih
5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.562.328.600,00	11.562.328.600,00	
5.02.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.070.629.000,00	9.070.629.000,00	
5.02.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2.023.606.600,00	2.023.606.600,00	
5.02.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	150.000.000,00	150.000.000,00	
5.02.01.1.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	75.330.000,00	75.330.000,00	
5.02.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	55.423.000,00	55.423.000,00	
5.02.01.1.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	65.519.000,00	65.519.000,00	
5.02.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	75.509.000,00	75.509.000,00	
5.02.01.1.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	46.312.000,00	46.312.000,00	
#AKHLAK ISO Badan Keuangan Daerah			

Lanjutan...			
PD/Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Renja 2026	Rincian pada SIPD	Selisih
5.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	20.000.000,00	20.000.000,00	
5.02.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	10.000.000,00	10.000.000,00	
5.02.01.1.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	10.000.000,00	10.000.000,00	
5.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	335.843.000,00	335.843.000,00	
5.02.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	141.079.000,00	141.079.000,00	
5.02.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	91.079.000,00	91.079.000,00	
5.02.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	50.000.000,00	50.000.000,00	
5.02.01.1.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	53.685.000,00	53.685.000,00	
#AKHLAK ISO Badan Keuangan Daerah			

Lanjutan...

PD/Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Renja 2026	Rincian pada SIPD	Selisih
5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.600.775.956,00	1.600.775.956,00	
5.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	41.079.000,00	41.079.000,00	
5.02.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	26.189.000,00	26.189.000,00	
5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	355.243.520,00	355.243.520,00	
5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	72.500.000,00	72.500.000,00	
5.02.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	200.000.000,00	200.000.000,00	
5.02.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	454.729.000,00	454.729.000,00	
5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	419.129.000,00	419.129.000,00	
5.02.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	31.906.436,00	31.906.436,00	

Lanjutan...

PD/Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Renja 2026	Rincian pada SIPD	Selisih
5.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	234.824.000,00	234.824.000,00	
5.02.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	38.824.000,00	38.824.000,00	
5.02.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	196.000.000,00	196.000.000,00	
5.02.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.723.846.320,00	3.722.896.320,00	(950.000,00)
5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	36.565.400,00	36.565.400,00	
5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	780.000.000,00	780.000.000,00	
5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.907.280.920,00	2.906.330.920,00	(950.000,00)

Lanjutan...

PD/Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Renja 2026	Rincian pada SIPD	Selisih
5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	300.820.000,00	300.820.000,00	-
5.02.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	236.820.000,00	236.820.000,00	-
5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	44.000.000,00	44.000.000,00	-
5.02.01.1.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	20.000.000,00	20.000.000,00	-
5.02.01.1.14 Fasilitas Keprotokolan	-	950.000,00	950.000,00
5.02.01.1.14.0001 Fasilitas dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	-	950.000,00	950.000,00

#AKHLAK

ISO

Badan Keuangan Daerah

RKBMD

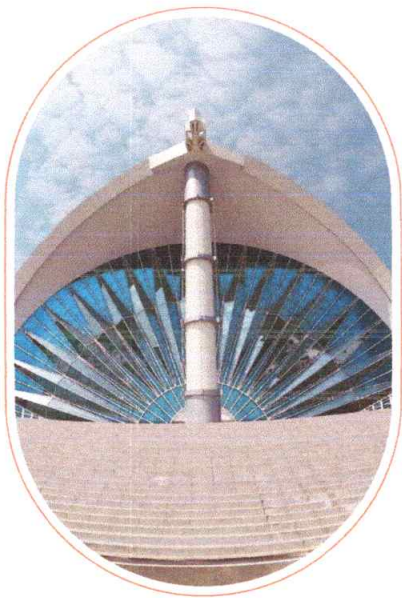
#AKHLAK

ISO

Badan Keuangan Daerah

>

PEMBAHASAN RENSTRA
2025 - 2029



TERIMA
KASIH



**Realisasi Anggaran Belanja
Badan Keuangan Daerah
Semester 1 pada 3 Tahun
terakhir (2023-2025)**

NO			Usuran/ Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub	Tahun									
				2023			2024			2025			
				Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%	
5	2		KEUANGAN										
			Badan Keuangan Daerah	963.574.259.788	225.888.501.806	33,44%	885.827.685.130	279.935.620.291	31,60%	787.073.147.705	199.020.811.106		25,29%
5	2	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	14.927.138.170	6.012.177.558	40,28%	16.683.757.116	6.280.336.170	37,64%	20.990.960.988	6.575.831.728		31,33%
5	1	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	247.435.900	91.360.900	36,92%	375.298.517	95.373.574	25,41%	422.994.096	139.119.316		32,89%
			Perangkat Daerah										
5	1	1	Penyusunan Dokumen	30.000.000	4.885.400	16,28%	69.246.000	22.241.000	32,12%	65.246.000	36.023.516		55,21%
			Perencanaan Perangkat Daerah										
5	1	1	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	60.351.800	21.581.000	35,76%	109.910.848	20.244.400	18,42%	104.060.800	50.683.100		48,71%
5	1	1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	78.455.000	64.894.500	82,72%	76.433.569	29.514.000	38,61%	85.903.727	35.063.500		40,82%
5	1	1	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	78.629.100	-	-	119.708.100	23.374.174	19,53%	76.433.569	17.349.200		22,70%
5	1	1	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	-	-	-	-	-	-	41.350.000	-		-
5	1	1	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	-	-	-	-	-	-	50.000.000	-		-

5	2	1	1	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.206.392.818	3.354.536.986	36,44%	9.355.860.600	3.795.875.894	40,57%	13.840.365.766	3.840.255.495	27,75%	
5	2	1	1	2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.990.123.218	2.747.347.986	39,30%	6.767.552.000	3.130.230.119	46,25%	11.320.416.166	3.367.577.703	29,75%
5	2	1	1	2	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2.037.106.600	513.773.000	25,22%	2.023.606.600	481.582.575	23,80%	2.023.606.600	262.214.500	12,96%
5	2	1	1	2	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	119.163.000	59.879.000	50,25%	189.609.000	59.475.500	31,37%	163.500.000	86.206.225	52,73%
5	2	1	1	2	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	30.000.000	16.750.000	55,83%	85.330.000	22.507.000	26,38%	75.330.000	9.449.000	12,54%
5	2	1	1	2	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	30.000.000	16.787.000	55,96%	78.423.000	15.754.200	20,09%	64.173.000	47.217.367	73,58%
1	1	0	2	0	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	-	-	-	65.519.000	41.684.000	63,62%	71.519.000	50.700.700	70,89%
1	1	0	2	0	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-	-	-	99.509.000	44.642.500	44,86%	75.509.000	16.890.000	22,37%
1	1	0	2	0	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	-	-	-	43.312.000	-	-	46.312.000	-	-
5	2	1	1	3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	5.000.000	2.850.000	57,00%	137.158.000	33.574.300	24,48%	20.000.000	4.264.000	21,32%	
5	2	1	1	3	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	5.000.000	2.850.000	57,00%	66.079.000	29.892.600	45,24%	10.000.000	-	-
1	1	0	3	0	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	-	71.079.000	3.681.700	5,18%	10.000.000	4.264.000	42,64%
5	2	1	1	5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	93.473.000	54.336.000	58,13%	525.843.000	52.918.800	10,06%	232.158.000	74.638.203	32,15%	
5	2	1	1	5	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	93.473.000	54.336.000	58,13%	161.079.000	37.778.500	23,45%	141.079.000	61.735.823	43,76%
1	1	0	5	0	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	-	-	-	91.079.000	11.170.300	12,26%	91.079.000	12.902.380	14,17%
1	1	0	5	0	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-	-	-	100.000.000	3.970.000	3,97%	-	-	-

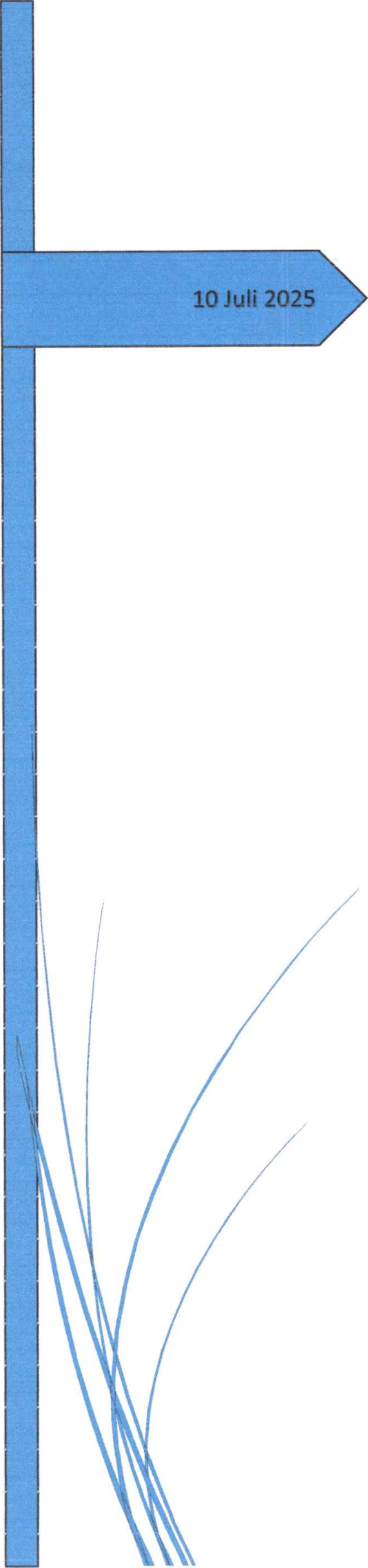
1	1	0	5	0	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	173.685.000	-	-	-	-	-	-
5	2	1	1	6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	880.304.480	654.464.386	74,35%	1.886.875.956	694.834.885	36,82%	1.455.980.242	645.270.015	44,32%	
1	1	0	6	0	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	71.079.000	6.000.000	8,44%	27.709.000	500.000	1,80%	
1	1	0	6	0	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-	-	-	56.189.000	6.908.750	12,30%	26.189.000	1.153.239	4,40%	
5	2	1	1	6	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	169.892.480	163.822.500	96,43%	355.243.520	116.149.000	32,70%	355.243.520	147.337.376	41,48%	
5	2	1	1	6	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	50.412.000	36.650.000	72,70%	72.500.000	13.340.000	18,40%	52.500.000	24.650.000	46,95%	
5	2	1	1	6	7	Penyediaan Bahan/Material	210.000.000	66.213.625	31,53%	200.000.000	70.962.289	35,48%	200.000.000	120.003.250	60,00%	
5	2	1	1	6	8	Fasilitas Kunjungan Tamu	210.000.000	178.751.420	85,12%	680.829.000	197.395.013	28,99%	424.792.286	258.071.180	60,75%	
5	2	1	1	6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	240.000.000	209.026.841	87,09%	419.129.000	284.079.833	67,78%	337.640.000	93.554.970	27,71%	
1	1	0	6	0	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-	-	-	31.906.436	-	-	31.906.436	-	-	
5	2	1	1	7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	190.066.400	120.222.811	63,25%	234.255.131	9.990.000	4,26%	1.040.679.000	214.619.315	20,62%	
1	1	0	7	0	5	Pengadaan Mebel	-	-	-	38.824.000	-	-	38.824.000	4.056.200	10,45%	
5	2	1	1	7	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	190.066.400	120.222.811	63,25%	195.431.131	9.990.000	5,11%	501.855.000	210.563.115	41,96%	
5	2	1	1	7	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	-	-	-	500.000.000	-	-	
5	2	1	1	8	8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.012.010.572	1.569.591.740	39,12%	3.812.245.912	1.463.297.460	38,38%	3.671.463.884	1.537.511.380	41,88%	
5	2	1	1	8	1	Penyediaan Jasa Surat	36.565.400	6.389.500	17,47%	36.565.400	6.664.100	18,23%	34.565.400	10.074.500	29,15%	
5	2	1	1	8	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	875.000.000	312.500.000	35,71%	875.000.000	312.500.000	35,71%	750.000.000	312.500.000	41,67%	
5	2	1	1	8	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Melebihi Pagu Validasi	3.109.445.172	1.250.702.240	40,22%	-	-	-	-	-	-	

1	1	0	8	0	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	-	2.900.680.512	1.144.133.360	39,44%	2.886.898.484	1.214.936.880	42,08%
2	1	1	9			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	283.455.000	164.814.735	58,14%	356.220.000	134.471.257	37,75%	287.320.000	120.154.004	41,82%
5	2	1	1	9	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	236.820.000	151.099.735	63,80%	236.820.000	134.471.257	56,78%	236.820.000	108.709.704	45,90%
0	1	0	9	0	9	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	46.635.000	13.715.000	29,41%	99.400.000	-	-	50.500.000	11.444.300	22,66%
1	1	0	9	0	7	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	-	-	-	20.000.000	-	-	-	-	-
5	2	1	1	14		Fasilitasi Keprotolan	-	-	-	-	-	-	20.000.000	-	-
5	2	1	1	14	1	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	-	-	-	-	-	-	20.000.000	-	-
5	2	2	1			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	947.253.712.446	218.725.863.173	23,09%	869.143.928.014	273.655.284.121	31,49%	766.082.186.717	192.444.979.378	25,12%
5	2	2	1	1		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	9.425.692.781	2.047.258.655	21,72%	10.143.053.325	2.082.047.599	20,53%	9.117.716.177	1.123.188.327	12,32%
5	2	2	1	1	1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	435.781.157	16.401.981	3,76%	395.259.000	92.532.000	23,41%	409.098.000	-	-
5	2	2	1	1	2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	509.880.500	-	-	449.197.000	-	-	407.052.000	-	-
5	2	2	1	1	5	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD	253.178.996	200.089.500	79,03%	365.134.000	93.632.771	25,64%	209.819.000	106.590.682	50,80%
5	2	2	1	1	6	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA- SKPD	253.164.828	37.510.600	14,82%	384.373.000	136.451.000	35,50%	430.227.800	-	-
5	2	2	1	1	7	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2.896.237.300	272.462.685	9,41%	2.982.692.362	219.954.200	7,37%	2.675.048.112	-	-
5	2	2	1	1	8	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	3.087.268.400	769.761.940	24,93%	2.876.497.000	1.112.537.000	38,68%	3.023.238.813	877.055.145	29,01%

5	2	2	1	1	9	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	1.990.181.600	751.031.949	37,74%	2.689.870.963	426.940.628	15,87%	1.963.232.452	139.542.500	7,11%
5	2	2	1	2		Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah	2.293.566.700	762.470.213	33,24%	2.261.827.005	548.580.149	24,25%	2.035.277.005	305.510.650	15,01%
5	2	2	1	2	2	Kabupaten/Kota									
5	2	2	2	1	2	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	434.855.500	20.654.441	4,75%	434.038.000	-	-	406.438.000	-	-
5	2	2	2	1	3	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	435.570.900	39.263.700	9,01%	435.568.000	1.496.250	0,34%	407.968.000	-	-
5	2	2	2	1	4	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	502.371.800	139.756.280	27,82%	442.494.000	53.476.000	12,09%	484.694.000	14.678.100	3,03%
5	2	2	1	2	5	Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	779.597.000	486.473.792	62,40%	732.006.500	389.728.399	53,24%	608.470.500	231.028.800	37,97%
5	2	2	1	2	7	Asistensi Pengelolaan Keuangan BLUD	116.171.500	52.555.000	45,24%	116.170.000	43.590.500	37,52%	41.398.000	32.728.750	79,06%
5	2	2	2	1	12	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintah Daerah	25.000.000	23.767.000	95,07%	101.750.505	60.289.000	59,25%	86.308.505	27.075.000	31,37%
5	2	2	1	3		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	1.902.327.688	922.788.770	48,51%	2.380.003.796	665.562.966	27,96%	1.853.943.796	550.381.236	29,69%

5	2	2	1	3	1	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	455.918.500	313.236.100	68,70%	414.559.796	229.751.749	55,42%	360.444.296	215.556.339	59,80%
5	2	2	1	3	3	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	243.660.100	56.718.300	23,28%	322.083.000	108.598.418	33,72%	256.557.600	71.340.968	27,81%
5	2	2	1	3	5	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	384.874.696	127.319.100	33,08%	385.216.000	59.855.000	15,54%	382.648.400	-	-
5	2	2	1	3	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	226.999.696	148.069.925	59,74%	665.180.000	165.987.299	24,95%	509.582.200	214.883.929	42,17%
5	2	2	1	3	8	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	595.874.696	277.445.345	16,32%	592.965.000	101.370.500	17,10%	344.711.300	48.600.000	14,10%
5	2	2	1	4	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	2.406.129.102	2.038.368.711	67,31%	2.815.638.502	1.919.624.314	68,18%	2.775.407.652	678.378.682	24,44%
5	2	2	1	4	2	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	-	-	-	-	-	-	323.085.212	165.079.790	51,09%
0	2	1	0	4	1	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan kas dan Pengeluaran Kas Daerah	25.000.000	-	-	331.735.212	195.647.000	58,98%	-	-	-
5	2	2	1	4	3	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	319.457.002	180.833.000	56,61%	561.726.990	411.296.600	73,22%	675.930.891	154.840.200	22,91%

5	2	2	1	4	4	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD, dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	-	-	-	-	-	-	635.935.249	358.458.692	56,37%
5	2	2	1	4	5	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	2.061.672.100	1.857.535.711	70,27%	771.670.000	417.996.282	54,17%	1.140.456.300	-	-
2	2	0	4	0	5	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	-	-	-	1.150.506.300	894.684.432	77,76%	-	-	-
5	2	2	1	5	5	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	931.220.996.175	212.954.976.824	22,51%	851.543.405.386	268.439.469.093	31,52%	750.299.842.087	189.787.520.483	25,29%
5	2	2	1	5	4	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	70.214.974.393	-	-	57.933.263.642	-	-	47.206.923.484	27.475.888.429	58,20%
5	2	2	1	5	8	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	11.474.756.000	-	-	9.372.905.000	150.000.000	1,60%	36.691.308.847	-	-
5	2	2	1	5	9	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	79.639.835.896	824.595.125	0,87%	73.045.924.489	71.761.000	0,10%	13.149.302.896	725.197.800	5,52%
5	2	2	1	5	10	Pengelolaan Dana bagi Hasil Provinsi	769.891.429.886	212.130.381.699	27,55%	711.191.312.255	268.217.708.093	37,71%	653.252.306.860	161.586.434.254	24,74%
5	2	3				PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1.393.409.172	1.150.461.075	81,99%	-	-	-	-	-	-
5	2	3	1	1		Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.393.409.172	1.150.461.075	81,99%	-	-	-	-	-	-
5	2	3	1	1	1	Penyusunan Standar Harga	1.393.409.172	1.150.461.075	81,99%	-	-	-	-	-	-



10 Juli 2025

**Notulen Rapat Evaluasi Kinerja
Triwulan II Badan Keuangan Daerah
Tahun Anggaran 2025 dan Pembahasan
Dokumen Perencanaan Badan Keuangan
Daerah Tahun Anggaran 2026**

Badan Keuangan Daerah



NOTULA

Sidang / Rapat : Evaluasi Kinerja Triwulan II Badan Keuangan Daerah TA. 2025 dan Pembahasan Dokumen Perencanaan Badan Keuangan Daerah Tahun 2026
Hari/Tanggal : Kamis, 10 Juli 2025
Tempat : Ruang Rapat Badan Keuangan Daerah
Lantai I Gedung Sasando Kantor Gubernur NTT

Surat Undangan :
Waktu Sidang/Rapat : 16.00 Wita
Acara :
1. Pembahasan dan Diskusi
2. Kesimpulan

Ketua : Drs. Benhard Menoh, MT
Sekertaris : Remmy Ch. Pah, S.STP, M.Si
Pencatat : Semarch Dewi Ayu Putri Bida, S.E

- Peserta Rapat :
- | | |
|--|---|
| • Bapak Aleksander Lelan, SE, MM | • Ibu Lisa S.P. Davidz, SP, M.Sc |
| • Bapak Willibrodus Wora, SE, M.Ec.Dev | • Maria Selvyana Lalu Beo, SE |
| • Ibu Ivoni S. Meok, SE., MM | • Bapak Yakobis Dano, SE |
| • Ibu Dra. Yenny C.M. Izaac, M.Si | • Bapak Yohanes Baptista Eko Prasetyo, SE |
| • Bapak Hilarus B. C. da Silva, SE, M.Ec.Dev | • Bapak Remmy Ch. Pah, S.STP, M.Si |
| • Ibu Sany Heldria Tetmilay, SE, M.Acc | • Marselina Ariany Pekambani, S.STP.,MM |
| • Ibu Vebby Rycke Saba, SE | • Katiana Tasya Wadu, S.Kom |
| • Ibu Helena W. Yacoba Lema, SE | • Andri Mboik, S.Tr.M |

A. Pembahasan dan Diskusi

Rapat dibuka oleh Drs. Benhard Menoh, MT selaku Kepala Badan Keuangan Daerah pada pukul 16.30 WITA. Sebelum masuk pada materi rapat terkait Evaluasi Kinerja Triwulan II Badan Keuangan Daerah TA. 2025 dan Pembahasan Dokumen Perencanaan Badan Keuangan Daerah Tahun 2026, Kepala Badan Keuangan Daerah terlebih dahulu ingin menyamakan persepsi terkait pembayaran honorarium di lingkungan Badan Keuangan Daerah. Beliau menekankan pentingnya keseragaman pemahaman agar proses pembayaran dapat berjalan tertib, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Setelah penyampaian pembukaan tersebut, Kepala Badan memberikan kesempatan kepada masing-masing Kepala Bidang untuk menyampaikan pendapat, masukan, atau tanggapan terkait:

❖ **Mekanisme Dan Kebijakan Pembayaran Honorarium.**

1. Bapak Yohanes Baptista Eko Prasetyo, SE (Kepala Sub Bagian Keuangan)

- Pembayaran honorarium tahun sebelumnya masih mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) No. 33 Tahun 2020. Saat ini telah terbit Perpres No. 72 Tahun 2025 sebagai perubahan dari regulasi sebelumnya. Ketentuan mengenai pembayaran honorarium untuk tim pelaksana kegiatan masih sama, yaitu mengacu pada besaran TPP (Tambahan Penghasilan Pegawai) berdasarkan kelas jabatan tertinggi, yaitu Bapak Sekretaris Daerah. Menurut informasi bahwa tahun ini TPP Bapak Sekertaris Daerah naik sehingga pola pembayaran awal dari 4,5,7 menjadi 3,4,6 yaitu 3 honorarium untuk Eselon I dan II, 4 honorarium untuk Eselon III dan 6 honorarium untuk Eselon IV dan Staf, sehingga dimohon untuk bersabar karena masih perlu untuk melakukan penyesuaian ulang terhadap pemetaan yang sudah dibuat.
- Terkait mekanisme pembayaran honorarium, yaitu terlebih dahulu melengkapi tanda tangan daftar bayar, kemudian dilakukan transfer ke rekening masing-masing pegawai. Karena kendala yang terjadi yaitu seringkali ada yang tidak melakukan tanda tangan daftar bayar sehingga menghambat dalam proses upload bukti bayar di aplikasi SIPD.
- Mekanisme pembayaran honorarium dengan melengkapi tanda tangan juga sebagai penanda bahwa setiap orang telah menerima sebanyak berapa kali. Ada yang 1 kali ada yang sudah 2 kali agar tidak terlewatkan atau mendapat pendobelan dalam pembayaran honorarium.
- Untuk keperluan transfer, digunakan sistem CMS. Terdapat dua jenis pengunggahan: Daftar Bayar Perorangan: rincian terlihat untuk masing-masing individu. Daftar Bayar Kelompok: hanya terlihat total keseluruhan. Jika daftar bayar yang diunggah adalah perorangan, maka prosesnya akan lebih lambat, karena sangat tergantung pada kondisi jaringan/sinyal dan stabilitas sistem aplikasi Bank NTT.

2. Bapak Aleksander Lelan, SE, MM (Kabid Akuntansi dan Pelaporan)

- Terkait mekanisme pembayaran honorarium, akan muncul pertanyaan ketika pegawai menandatangani daftar bayar terlebih dahulu namun belum menerima uang.
- Sarannya adalah transfer dilakukan terlebih dahulu, dan setelah pegawai menerima dan menunjukkan bukti transfer, barulah dilakukan tanda tangan daftar bayar.
- Harus menyepakati batas waktu transaksi agar tidak melebihi waktu pertanggungjawaban keuangan.
- Prosedur Pembayaran honorarium sudah berbasis non tunai jadi yang diperlukan adalah bukti transfer sebagai bukti pertanggungjawaban

3. Ibu Ivoni S. Meok, SE., MM (Plt. Kabid Perbendaharaan) dan Ibu Dra. Yenny C.M. Izaac, M.Si (Plt. Kabid AKK)

- Sependapat dengan saran dari Bapak Kabid Akuntansi dan Pelaporan terkait mekanisme pembayaran honorarium yaitu menunjukkan bukti transfer, barulah dilakukan tanda tangan daftar bayar dengan pertimbangan yaitu ada juga tim kerja yang berasal dari luar Badan Keuangan Daerah sehingga ketika diminta tanda tangan terlebih dahulu maka akan menjadi masalah jika belum ditransfer

4. Ibu Sany Heldria Tetmilay, SE, M.Acc (Kasubid Akuntansi Belanja Aset, Piutang dan Pengeluaran Pembiayaan)

- Sependapat dengan saran dari Bapak Kabid Akuntansi dan Pelaporan terkait mekanisme pembayaran honorarium yaitu menunjukkan bukti transfer, barulah dilakukan tanda tangan daftar bayar dengan pertimbangan yaitu baik pegawai yang ada dalam Badan Keuangan Daerah maupun dari luar adalah satu tim kerja dan ada dalam 1 (satu) daftar pembayaran yang sama sehingga semuanya ditransfer satu kali.

5. Bapak Drs. Benhard Menoh, MT (Kepala Badan Keuangan Daerah)

- Pola pembayaran honorarium yang berlaku sekarang adalah pola 3,4,6
- Menegaskan bahwa semua orang pasti menerima honorarium. Namun yang menjadi persoalan saat ini adalah mekanismenya apakah tanda tangan lebih dahulu atau transfer lebih dahulu.
- Hingga saat ini belum ada regulasi resmi terkait urutan mekanisme tersebut sehingga menggunakan kebijakan internal sementara
- Diharapkan agar pada rapat berikutnya sudah ada informasi pasti terkait pola dan mekanisme pembayaran honorarium.

❖ **Evaluasi Kinerja Triwulan II Badan Keuangan Daerah TA. 2025 dan Pembahasan Dokumen Perencanaan Badan Keuangan Daerah Tahun 2026**

Setelah pembahasan mengenai mekanisme pembayaran honorarium, Bapak Kepala Badan Keuangan melanjutkan pembahasan inti dari rapat hari ini yaitu tentang Evaluasi Kinerja Triwulan II Badan Keuangan Daerah TA. 2025 dan Pembahasan Dokumen Perencanaan Badan Keuangan Daerah Tahun 2026. Tanggapan dari setiap peserta rapat adalah sebagai berikut :

1. Bapak Drs. Benhard Menoh, MT (Kepala Badan Keuangan Daerah)

- Dalam realisasi APBD s.d tanggal 30 Juni 2025 PAD sebesar 42,40% . Yang menjadi persoalan ialah Transfer DAK yang belum ada pemasukan sama sekali akibat dari DAK Pendidikan dan Kesehatan yang belum maksimal (sama sekali belum bergerak).
- Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi belum bergerak sama sekali karena menurut Kadis PUPR masih dalam status kontrak
- Terkait Belanja Pegawai diharapkan agar pembayaran TPP Purnabakti paling lambat adalah Desember 2025 harus selesai dibayar termasuk TPP Bapak Sekda.
- Terkait Belanja Bagi Hasil, Badan Keuangan belum bisa bayar hutang Kab/Kota karena surat dari Bapenda mengatakan bahwa Kab/Kota harus terlebih dahulu melunasi Piutang yang ada pada Provinsi (Pajak Kendaraan yang belum selesai)
- Terkait Renja 2026, untuk sementara masih menggunakan pagu yang lama karena masih perlu didiskusikan dengan Bapenda (presentasi jumlah PAD)
- Untuk Dana Pembangunan Gedung Arsip Badan Keuangan Daerah masukan saja dalam Renja 2026, sambil menunggu kepastian lokasi pembangunan gedung.
- Terkait dengan Perubahan Perpres No. 72 Tahun 2025 yang menggantikan Perpres No. 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, dimana dalam Perpres No. 72 Tahun 2025 mengatur tentang besaran nominal pembayaran honorarium dan lembur yang berlaku per tanggal 18 Juni 2025 berbeda nominalnya dengan Pergub NTT, maka harus diketahui bahwa dasar yang dipakai adalah aturan tertinggi, walaupun Pergub belum melakukan penyesuaian. Jadi pembayarannya yaitu SPK tetap jalan, tetapi pembayaran mengikuti Perpres terbaru (Perpres No. 72 Tahun 2025).
- Pembahasan mengenai Renstra dan Renja 2026 akan diagendakan pada rapat berikutnya. Diharapkan agar Sekretariat menyiapkan dokumen Renstra yang telah disusun untuk dibagikan pada setiap bidang agar dipelajari terlebih dahulu dan selanjutnya didiskusikan bersama.

2. Bapak Aleksander Lelan, SE, MM (Kabid Akuntansi dan Pelaporan)

- Terkait PPKD, Dana Bagi Hasil yang belum di eksekusi yaitu yang paling besar biasanya dari pajak rokok dan pajak kendaraan bermotor karena jatahnya 70% kabupaten
- Pajak rokok ada aturannya 1 minggu setelah transfer baru di eksekusi sedangkan pajak bahan bakar kadang luput sehingga diakhir tahun sisa yang belum ditransfer kadang nominalnya besar. Oleh karena itu nanti dievaluasi sehingga khusus triwulan II yang sudah memenuhi bisa digeser karena nilainya besar yaitu 70% dari porsi transfer pusat.
- Jika ingin menaikkan TPP maka harus melihat pertimbangan-pertimbangan, diantaranya uang fiskal agar saat TPP dinaikan, jangan kewalahan dalam mengatur keuangan untuk pembayaran.

3. Ibu Lisa S.P. Davidz, SP, M.Sc (Kasubid Penyesuaian Anggaran Bidang Pemerintahan).

- Jika ingin menaikkan TPP maka sesuai dengan regulasi, waktunya adalah sekarang untuk dianggarkan (harus dimasukan dalam PPAS) sebelum akhir tahun sehingga tahun depan sudah dapat dieksekusi. Dari bidang anggaran sudah dibuatkan konsepnya, namun yang menjadi persoalan adalah harus mendapat ijin dari Kemenkeu.
- Pertimbangan yang dipakai untuk menaikkan TPP yaitu menghapus honorarium panitia pelaksana kegiatan disemua SKPD.
- Menanyakan hal terkait Perpres No. 72 Tahun 2025 yang menggantikan Perpes No. 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, dimana dalam Perpres No. 72 Tahun 2025 mengatur tentang besaran nominal pembayaran honorarium dan lembur yang berlaku per tanggal 18 Juni 2025. Sedangkan besaran tersebut berbeda dengan Pergub NTT yang menjadi dasar penganggaran biaya honorarium dan lembur.

4. Bapak Remmy Ch. Pah, S.STP, M.Si (Perencana Ahli Muda)

- Menekankan bahwa penyusunan Renstra Badan Keuangan Daerah tahun 2025-2029 tidak bisa dilakukan hanya dengan masing-masing bidang mengusulkan rencana kerja, namun tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Badan Keuangan Daerah Tahun 2025-2029 harus didiskusikan dan disepakati bersama antar bidang.
- Mengusulkan agar dijadwalkan pertemuan khusus untuk membahas Renstra Badan Keuangan Daerah Tahun 2025-2029 tersebut secara menyeluruh dengan masing-masing bidang.

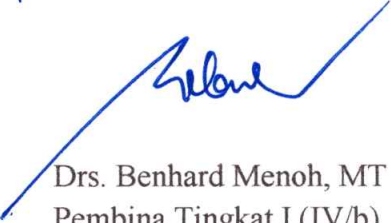
B. Kesimpulan

Beberapa kesimpulan yang didapat sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil rapat, Kepala Badan Keuangan Daerah menyampaikan bahwa Evaluasi Kinerja Triwulan II menunjukkan beberapa kendala dalam realisasi PAD, belanja modal, dan DAK yang perlu ditindaklanjuti.
2. Penyusunan Renja 2026 tetap berjalan dengan pagu lama sambil menunggu pembahasan dengan Bapenda.
3. Pembahasan mengenai Renstra dan Renja 2026 akan diagendakan pada rapat berikutnya.
4. Sekretariat menyiapkan dokumen Renstra yang telah disusun untuk dibagikan pada setiap bidang agar dipelajari terlebih dahulu dan selanjutnya didiskusikan bersama.

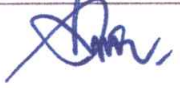
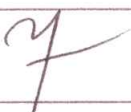
Demikian notulen ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

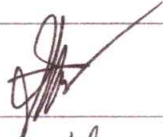
Pimpinan Sidang Rapat,
Kepala Badan Keuangan Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur, 


Drs. Benhard Menoh, MT
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19720512 199101 1 001

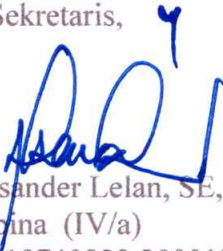
DAFTAR HADIR

Hari / Tanggal : Kamis, 10 Juli 2025
Agenda : Evaluasi Kinerja Triwulan II Badan Keuangan Daerah TA 2025
Tempat : Ruang Rapat Badan Keuangan Daerah

No.	Nama	Jabatan	Jenis Kelamin	No. Tlp	Paraf
1.	Drs. B. Mendi, MT.	Kabag	L		
2.	Aleks Lefg	Kabid	L		
3.	Ivoni Meok	Kasubid	P		
4.	samy. H. Tehunlay	Kasubid	P		
5.	Helena W.Y Lema	Analisis	P		
6.	Fouel & da Silva	Kasubid	L		
7.	Vebody R. Seba	Kasubid	P		
8.	Elco Pracetjo	Kasubid	L		
9.	Renny. Pali	Perencanaan An	L		
10.	Yakobir Daro	Kasubid	L		
11.	Tenny Izad	Analisis	P		

No.	Nama	Jabatan	Jenis Kelamin	No. Tlp	Paraf
12.	Wilibrusius Wora	Plt. Kabid Arpan	L		A
13.	Selvy L. Beo	Kasubid	P		SB
14.	Lisa Davidz	Kasubid	P		Star
15.	Mareline A.P.	staf	P.	08227761028	
16.	Kahana T. Wader	Staf	P		K.
17.	Semarch Dewi A.P. Bida	Staf PDE	P		Dph
18.	ANDRE MBOEK	staf	L		A
19.					
20.					
21.					
22.					
23.					

a.n. Kepala Badan Keuangan Provinsi
Nusa Tenggara Timur,
Plt. Sekretaris,



Aleksander Lelan, SE, MM
Pembina (IV/a)
NIP. 19740822 200012 1 004



LAPORAN RAPAT EVALUASI TRIWULAN III TAHUN 2025

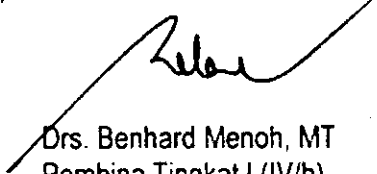
BADAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI NTT



KATA PENGANTAR

Puji Syukur patut kita Panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya, kami dapat menyelesaikan Laporan Rapat Evaluasi Triwulan III dengan baik. Adapun maksud penyusunan laporan ini adalah memberikan informasi kinerja periode Triwulan III Tahun 2025 pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Informasi tersebut berupa capaian Program, Kegiatan, maupun Sub Kegiatan serta anggaran. Kami berharap laporan ini dapat memberikan wawasan yang berguna bagi pihak-pihak yang terlibat. Besar harapan Kami hasil evaluasi yang membangun agar Pelaporan Kinerja Kami menjadi lebih baik di triwulan – triwulan berikutnya.

9 Kepala Badan Keuangan Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur. 12



Drs. Benhard Menoh, MT
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19720512 199101 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 mengenai Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Badan Keuangan Daerah ditetapkan sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan yang menjadi kewenangan daerah.

Dalam menjalankan peran strategis tersebut, Badan Keuangan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Struktur ini menegaskan pentingnya peran Badan Keuangan Daerah dalam mendukung sistem pemerintahan daerah, khususnya dalam aspek pengelolaan keuangan yang efisien dan akuntabel.

Sebagai pelaksana fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang keuangan, Gubernur melalui Badan Keuangan Daerah menyelenggarakan berbagai tugas dan fungsi teknis yang bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang efisien, transparan, dan akuntabel. Adapun tugas dan fungsi dimaksud meliputi:

1. Penyusunan kebijakan teknis di bidang keuangan daerah;
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang keuangan daerah;
3. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang keuangan daerah;
4. Pembinaan teknis terhadap penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang keuangan daerah; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dengan kedudukan, tugas pokok, dan fungsi tersebut, Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki peran penting dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang baik (*good governance*) serta pengelolaan keuangan yang profesional, efisien, dan akuntabel.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya secara optimal, Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Tahun Anggaran 2025 telah

menetapkan berbagai program dan kegiatan. Pelaksanaan program/kegiatan tersebut bertujuan untuk mendukung pencapaian target pembangunan daerah, khususnya pada aspek pengelolaan keuangan dan peningkatan pelayanan publik di bidang keuangan.

Sebagai bentuk akuntabilitas dan pertanggungjawaban pelaksanaan program/kegiatan, Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur menyelenggarakan Rapat Evaluasi Kinerja Triwulan I dan Triwulan II Tahun 2025. Tujuan utama dari rapat ini adalah:

1. Melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap realisasi program dan kegiatan yang telah dilaksanakan;
2. Mengidentifikasi permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan;
3. Memberikan solusi dan rekomendasi untuk percepatan pelaksanaan kegiatan pada triwulan berikutnya;
4. Menilai capaian kinerja berdasarkan indikator output dan outcome yang telah ditetapkan.

Dengan adanya evaluasi Triwulan ini, diharapkan seluruh perangkat kerja dalam lingkup Badan Keuangan Daerah dapat bekerja secara terarah, terukur, dan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah, serta mendukung tercapainya tujuan pembangunan daerah yang efektif dan berkelanjutan.

B. DASAR HUKUM

- a. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- e. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 Nomor 006, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0130);
- f. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 95 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 Nomor 095);
- g. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.03.0000/001/2025, tanggal 12 Juni 2025.

C. TUJUAN

Tujuan pelaksanaan rapat yaitu pemantauan, evaluasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang telah dilaksanakan periode Triwulan III Tahun 2025, selain itu tujuan dari dilakukan monitoring dan evaluasi kinerja dan anggaran bertujuan untuk:

- 1. Sebagai bentuk komitmen Pimpinan untuk memastikan bahwa setiap indikator kinerja dapat dicapai secara efektif dan terukur,
- 2. Untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan setiap indikator kinerja yang ditetapkan,
- 3. Untuk mengetahui apakah rencana kerja dan anggaran Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT berjalan efektif sesuai dengan target yang telah ditetapkan,
- 4. Sebagai bentuk pengendalian dan kontrol terhadap pencapaian tujuan dan sasaran.

D. HASIL YANG DIHARAPKAN

Hasil yang diharapkan dari pelaksanaan rapat pembahasan kinerja yaitu pelaksanaan program/ kegiatan dapat terarah, tepat dan diharapkan mampu menghasilkan langkah yang tepat dalam pengolahan serta pemanfaatan pengalokasian anggaran di berbagai segmen

kegiatan Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT, serta memperoleh tingkat capaian kinerja yang telah ditetapkan.

E. PEMBIAYAAN

Pembiayaan pelaksanaan kegiatan ini bersumber dari APBD Provinsi NTT TA.2025 pada DPA Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT Tahun Anggaran 2025.

BAB II

PELAKSANAAN KEGIATAN

A. PESERTA RAPAT

Peserta rapat pembahasan rapat kinerja triwulan Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT Tahun 2025 melibatkan masing-masing unit kerja pada Badan Keuangan Daerah yang terdiri dari:

1. Kepala Badan
2. Sekretaris Badan
3. Kepala Bidang
4. Kepala Sub Bidang
5. Kepala Sub Bagian
6. JFT
7. Pelaksana

B. TEMPAT DAN WAKTU PELAKSANAAN

Rapat pembahasan kinerja Triwulan III Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT Tahun 2025 dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2025 yang bertempat di Ruang Rapat Lantai 1 Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT.

C. METODE PELAKSANAAN

Metode yang digunakan adalah berupa pemaparan realisasi serta diskusi untuk memperoleh solusi dan upaya pemecahan permasalahan yang ada.

D. PEMBAHASAN DALAM RAPAT

Dalam pelaksanaan rapat ini dipimpin oleh Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT, dimana pelaksanaan rapat memaparkan beberapa pokok pembahasan yakni:

- ❖ Realisasi APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur
- ❖ Laporan Realisasi dan Capaian Kinerja Badan Keuangan Daerah Triwulan III
- ❖ Perbandingan realisasi tahun 3 tahun terakhir
(Notulen rapat terlampir)

BAB III

PENUTUP

Rapat pembahasan ini dilakukan untuk pemantauan, evaluasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan program/ kegiatan yang telah dilaksanakan Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT Triwulan III Tahun Anggaran 2025. Pelaksanaan rapat diharapkan mampu menghasilkan langkah yang tepat dalam pengolahan serta pemanfaatan pengalokasian anggaran di berbagai segmen kegiatan Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT, serta memperoleh tingkat capaian kinerja yang telah ditetapkan.

Demikian laporan ini disampaikan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan.

Kepala Badan Keuangan Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur



Bernhard Mench MT
Pembina Tingkat II (P/b)
NIP. 19720512 199101 1 001

LAMPIRAN



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
BADAN KEUANGAN DAERAH
Jalan Raya El Tari No. 52 Kupang 85111
Telepon : (0380) 833145 - 832711

NOTULA

Sidang / Rapat : Evaluasi Kinerja Triwulan III Badan Keuangan Daerah TA. 2025

Hari/Tanggal : Selasa, 14 Oktober 2025

Temapat : Ruang Rapat Badan Keuangan Daerah
Lantai I Gedung Sasando Kantor Gubernur NTT

Surat Undangan :

Waktu Sidang/Rapat : 16.00 Wita

Acara :

1. Pembahasan dan Diskusi
2. Kesimpulan dan Saran

Ketua : Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT

Sekretaris : Sekretaris

Pencatat : Sisi Mellania Nuryah, S.Mat

Peserta Rapat :

- ❖ Bapak Arifin, S.Sos.,MM
- ❖ Bapak Willibrodus Wora, SE, M.Ec.Dev
- ❖ Bapak Yosef M. R. Amapiran, S.Si
- ❖ Bapak Heronimus Hayantowati, S.Fil.,MM
- ❖ Ibu Ivoni S. Meok, SE., MM
- ❖ Ibu Dra. Yenny C.M. Izaac, M.Si
- ❖ Ibu Vebby Rycke Saba, SE
- ❖ Ibu Helena W. Yacoba Lema, SE
- ❖ Ibu Lisa S.P. Davidz, SP, M.Sc
- ❖ Ibu Maria Selvyana Lalu Beo, SE
- ❖ Bapak Yohanes Baptista Eko Prasetyo, SE
- ❖ Bapak Paulus Laurenst Sodak, S.Pi.,MM
- ❖ Bapak Yakobis Dano, SE

- ❖ Ibu Vincentia Nona, SE
- ❖ Maria R. Meo, S.Kom
- ❖ Andry Anin
- ❖ Katiana T. Wadu, S.Kom
- ❖ Semarch D. A. P. Bida, SE
- ❖ Rizka Ch. Bessie
- ❖ Yolanda Bere Ati
- ❖ Aurel Tukan
- ❖ Tenga F. Itu
- ❖ Nencylia C. Handatu
- ❖ Ivan J. Christian

A. Pembahasan dan Diskusi

Rapat dibuka oleh Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak Drs. Benhard Menoh, yang memaparkan bahwa hingga Triwulan III per 30 September 2025, realisasi pendapatan daerah mencapai Rp 2.522.620.228.370 atau 73,49% dari target sebesar Rp 3.432.606.365.725. Sementara itu, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Badan Keuangan Daerah baru mencapai Rp 62.780.716.646 atau 52,53% dari target Rp 119.519.178.857. Untuk realisasi anggaran belanja, dari total pagu Rp 787.073.147.706, baru terealisasi sebesar Rp 298.988.546.061 atau 37,78%. Sehubungan dengan capaian tersebut, Kepala Badan meminta masing-masing bidang menyampaikan progres pelaksanaan kegiatan, termasuk kendala yang dihadapi serta rencana percepatan sebagai upaya mendorong peningkatan realisasi belanja hingga akhir tahun anggaran.

- Penyiampaian dari Bapak Arifin, S.Sos., MM selaku Sekretaris Badan: Untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan pagu sebesar Rp 20.990.960.988, telah terealisasi sebesar Rp 10.773.434.397 atau 51,32%. Pada Sub Bagian Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Sub Bagian Keuangan, serta Sub Bagian Kepegawaian dan Umum, rata-rata realisasi telah mencapai di atas 50%. Sementara itu, realisasi Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah baru mencapai 21,32%. Sekretariat juga menyampaikan beberapa permasalahan, antara lain:

- a. Sebagian besar bidang, sub bidang, sekretariat, dan sub bagian belum menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan tepat waktu, sehingga menyebabkan keterlambatan proses administrasi.

- b. Arsip data pegawai belum terkumpul secara lengkap, karena masih terdapat pegawai yang belum menyerahkan dokumennya kepada Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
 - c. Penanganan disiplin pegawai belum optimal, di mana beberapa kasus ketidakdisiplinan pegawai sering terlambat dilaporkan sehingga proses penyelesaian menjadi lebih rumit.
- Penyampaian dari Bapak Yosef M. R. Amapiran, S.Si selaku Kepala Bidang Anggaran
Untuk Bidang Anggaran, dengan pagu sebesar Rp 9.117.716.177, realisasi yang dicapai adalah Rp 3.661.573.229 atau 40,16%.
Kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain:
 - o Rapat Paripurna Penyampaian Tanggapan Gubernur terhadap Pandangan Umum Fraksi-Fraksi atas Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.
 - o Konsultasi Jadwal Pembahasan serta pengantaran Buku Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 ke Kementerian Dalam Negeri.
 - o Pelaksanaan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 di Kementerian Dalam Negeri.
 Dokumen-dokumen berikut telah selesai disusun:
 - o Laporan Rencana Pembayaran Dukungan Penggajian DAU PPPK 2025.
 - o Dokumen Umum Penyusunan RKA SKPD Tahun Anggaran 2026.
 - o Dokumen Kebijakan Umum APBD (KUA) Provinsi NTT Tahun Anggaran 2026.
 - o Dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Provinsi NTT Tahun Anggaran 2026.
 - o Dokumen Penambahan Kegiatan/Sub Kegiatan Baru pada KUA-PPAS Provinsi NTT Tahun Anggaran 2026.
 Selain itu, telah dilakukan pembahasan pada:
 - o Rapat Dialog Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD bersama para pemangku kepentingan.
 - o Rapat Revisi Peraturan Gubernur NTT Nomor 22 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur NTT Nomor 72 Tahun 2024 mengenai Tunjangan Perumahan dan Transportasi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD.
- Bidang Anggaran juga menyampaikan beberapa permasalahan yang dihadapi, yaitu:
1. Keterlambatan penginputan rincian RKA SKPD akibat kendala *maintenance* pada server SIPD pusat, sehingga dibutuhkan waktu tambahan untuk

penginputan RKA-SKPD (Peraturan Gubernur Pergeseran APBD Perubahan II Tahun Anggaran 2025).

2. Terdapat beberapa sub kegiatan baru yang diusulkan oleh SKPD dalam Dokumen Rancangan Awal KUA-PPAS Tahun Anggaran 2026 namun tidak tercantum dalam Dokumen Rancangan Akhir RKPD Tahun 2026.
 3. Kendala pada penginputan pagu Rancangan Perubahan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2025, karena beberapa perangkat daerah masih belum melakukan penginputan.
 4. Adanya arahan Pemerintah Pusat serta pelaksanaan program Dasa Cita Gubernur dan Wakil Gubernur, yaitu kegiatan Balap Sepeda Internasional Tour de EnTeTe Tahun 2025, pada tahapan Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2025, sehingga pergeseran anggaran tidak dimungkinkan dilakukan dalam SIPD-RI.
- Penyampaian dari Bapak Heronimus Hayantowati, S.Fil., MM selaku Kepala Bidang Pembinaan Keuangan Kabupaten/Kota:
Bidang Pembinaan Keuangan Kabupaten/Kota memiliki pagu sebesar Rp 2.035.277.005, dengan realisasi mencapai Rp 1.085.306.271 atau 53,32%. Kegiatan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 serta Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 direncanakan akan dilaksanakan pada bulan Oktober sampai dengan Desember tahun ini. Adapun untuk:
 - Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Manggarai Timur beserta dokumen pendukung Tahun Anggaran 2025,
 - Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Belu beserta dokumen pendukung Tahun Anggaran 2025,
 - Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Ngada beserta dokumen pendukung Tahun Anggaran 2025, seluruhnya telah dilakukan pengecekan pada minggu pertama dan kedua bulan September 2025.
 - Untuk materi Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota TA 2025, proses evaluasi dilakukan pada saat dokumen telah lengkap diserahkan ke Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT.

- Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2025 telah dilaksanakan, dengan hasil diterbitkannya SK Gubernur NTT Nomor 900/192/BKUD5/2025 tanggal 30 September 2025 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2025.
- Rapat evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2025 juga telah dilaksanakan, dengan hasil diterbitkannya SK Gubernur NTT Nomor 900/173/BKUD5/2025 tanggal 30 September 2025 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2025.
- Selanjutnya, rapat evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2025 telah dilaksanakan pada 19 September 2025, dengan hasil diterbitkannya SK Gubernur NTT Nomor 900/174/BKUD5/2025 tanggal 30 September 2025 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2025.
- Untuk penyampaian dan pembahasan hasil evaluasi Perubahan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2025 Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Belu, dan Kabupaten Ngada bersama Kementerian Keuangan serta Kementerian Dalam Negeri melalui *zoom meeting*, kegiatan tersebut telah dilaksanakan pada 24 September 2025, dengan adanya catatan yang perlu menjadi perhatian sebagaimana tertuang dalam Surat Rekomendasi Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1.4/1042/SD.IV/1 KEUDA tanggal 24 September 2025.
- List rekapan LRA Kabupaten/Kota telah dikirimkan kepada Kementerian Dalam Negeri, Bank Indonesia, Kanwil Perbendaharaan Provinsi NTT, dan Kantor DJP Pajak Pratama, serta dilakukan secara rutin setiap minggu.
Adapun permasalahan yang dihadapi:
 1. Keterlambatan penyampaian Laporan Realisasi Anggaran (LRA) mingguan bulan September TA 2025 oleh beberapa Kabupaten/Kota.
 2. Keterlambatan penyampaian hard copy Perda dan Perbup APBD TA 2025. Kabupaten/kota yang belum menyampaikan yaitu:

Kab. Lembata, Kab. Sumba Tengah, Kab. Manggarai, Kab. Ngada, Kab. TTS, Kab. Alor, Kota Kupang, Kab. Ende, dan Kab. Rote Ndao.

3. Ketidaksesuaian narasi indikator strategi kewilayahan dalam Rancangan KUA-PPAS, antara lain pada indikator: Akselerasi investasi & pertumbuhan ekonomi, Kesehatan, Perikanan & pertanian, Pembangunan desa, koperasi, dan UMKM, Pendidikan.
 4. Evaluasi Rancangan Perubahan APBD TA 2025 untuk beberapa kabupaten menunjukkan ketidaksesuaian terhadap:
 1. Ketentuan peraturan yang lebih tinggi
 2. Kepentingan umum
 3. Perubahan RKPD, KUA, dan PPAS
 4. RPJMD
 5. Tahapan penyusunan Perda & Perkada
 6. Kebijakan alokasi anggaran (prioritas nasional, prioritas daerah, mandatory spending, SPM, dsb.)
 5. Sebagian besar kabupaten/kota belum menerapkan transaksi KKPD (Kartu Kredit Pemerintah Daerah).
- Penyampaian Bapak Willibrodo Wora, SE.,M.Ec.Dev selaku Kepala Bidang Perbendaharaan
Bidang Perbendaharaan memiliki pagu sebesar Rp1.853.943.796,- dengan realisasi hingga 30 September 2025 sebesar Rp1.068.692.746,- (57,64%). Untuk Bendahara Umum Daerah (BUD), saldo awal tercatat sebesar Rp526.503,-. Realisasi penerimaan sampai dengan 30 September 2025 mencapai Rp630.150.390.512,-, sementara realisasi pengeluaran sebesar Rp562.044.425.127,-, sehingga terdapat sisa saldo RKUD sebesar Rp594.609.385.235,-. Terkait pengelolaan deposito daerah hingga 30 September 2025, total saldo deposito berjumlah Rp175.000.000.000,-.
Adapun Permasalahan yang Dihadapi:
 1. Pengangkatan PPPK Provinsi NTT per 1 Juli 2025 sebanyak 5.480 orang memerlukan perhatian dalam penyiapan belanja gaji dan tunjangan.
 2. Masih terdapat sisa Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun 2017–2024 yang perlu ditindaklanjuti.
 3. Penyaluran DAK Fisik Tahun Anggaran 2025 masih memerlukan penyempurnaan dan koordinasi lanjutan.
 4. OPD lingkup Pemerintah Provinsi NTT perlu meningkatkan pemahaman terhadap ketentuan perpajakan sehubungan dengan implementasi Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Coretax).
 5. Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) masih menghadapi sejumlah persoalan teknis dan administratif.

6. Terkait pembayaran TPP Juli 2025, baru 26 OPD yang telah melakukan pengajuan dan pembayaran, sedangkan 8 OPD lainnya belum mengajukan permintaan pembayaran.
 7. Penggunaan KKPD Non-Revolving masih memerlukan penyesuaian pada beberapa OPD terkait mekanisme dan tata kelolanya.
- Penyampaian Ibu Helena W. Yacoba Lema, SE selaku Kasubid Akuntansi Pendapatan, Piutang, dan Penerimaan Pembiayaan
Bidang Akuntansi dan Pelaporan memiliki pagu anggaran sebesar Rp2.775.407.652,- dengan realisasi per 30 September 2025 sebesar Rp1.448.844.566,- (50,69%). Sampai dengan triwulan III Tahun 2025, pelaksanaan program dan kegiatan pada Bidang Akuntansi dan Pelaporan berjalan tanpa hambatan berarti. Penyerapan anggaran telah sesuai dengan kondisi riil pelaksanaan di lapangan dan mengikuti jadwal (schedule) serta tahapan waktu kegiatan yang telah ditetapkan. Secara umum, tidak terdapat isu signifikan yang menghambat pelaksanaan kegiatan di bidang ini, dan progres pelaksanaan berjalan sesuai rencana.

B. Kesimpulan dan Saran

Untuk sekretariat:

1. Masing-masing bidang/sub bidang/sub bagian segera menyampaikan Laporan Bulanan paling lambat satu minggu setelah diminta.
2. Ditambah dana untuk bimtek dan diklat untuk seluruh pegawai
3. Selalu menyampaikan informasi terkait pengumpulan kelengkapan arsip data pegawai melalui Nota Dinas maupun WA grup
4. Memberikan sanksi yang tegas dan konsisten terhadap pegawai yang indisipliner.
5. Atasan langsung rutin melakukan pengawasan terhadap kehadiran pegawai pada unit kerjanya, dan segera melaporkan kepada Kasubag Kepegawaian dan Umum apabila terdapat pegawai di unitnya yang melakukan tindakan indisipliner

Untuk Bidang Anggaran:

1. Menindaklanjuti Permasalahan diatas, Langkah-langkah yang dilakukan Tim Kerja Bidang Anggaran yaitu berkoordinasi SKPD dan Tim SIPD di pusdatin Kementerian Dalam Negeri sehingga Proses penginputan dapat dilaksana sesuai ketentuan dan Peraturan Gubernur Pergeseran APBD Perubahan II Tahun Anggaran 2025 yang ditetapkan oleh kepala daerah.

2. Menindaklanjuti Permasalahan diatas, Tim TAPD dan SKPD melakukan desakan untuk harmonisasi , Sinkronisasi dan Penyelarasan antar dokumen Perencanaan dan Dokumen Penganggaran sehingga Meminimalisir terjadinya Penambahan Sub Kegiatan Baru pada saat penandatanganan Nota Kesepakatan antara Gubernur dan DPRD.
3. Terkait Permasalahan di Atas Tim Kerja Bidang Anggaran Berkoordinasi Mengingatkan Perangkat Daerah untuk segera Melakukan Penginputan Pagu Rancangan Perubahan KUA dan Rancangan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2025 Agar Jumlah Pagu Sesuai Dengan yang Ditetapkan.
4. Berkoordinasi dengan Tim Pengelola Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Pusat Data dan Informasi Pusdatin Kemendagri di Jakarta sehingga pergeseran anggaran pada tahapan perubahan RAPBD dapat diinput pada SIPD-RI dan ditetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 Nomor : 41 Tahun 2025.

Untuk Bidang Pembinaan Keuangan Kabupaten/Kota:

1. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur terus melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota agar menyampaikan LRA tepat waktu setiap minggu, sesuai jadwal yang ditentukan melalui grup whatsapp maupun dihubungi secara langsung.
2. Pemerintah Provinsi juga akan tetap melaksanakan fungsi pembinaan kepada kab/kota yang belum memulai proses transaksi dengan menggunakan kartu kredit pemerintah daerah.
3. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah mengarahkan Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Sabu Raijua, kabupaten Sumba Barat Daya, Kota Kupang, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Manggarai, kabupaten Lembata, Kabupaten Belu, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Ngada, Kabupaten TTU agar hal-hal teknis yang menjadi koreksi dalam Hasil evaluasi Ranperda Pertanggungjawaban TA 2024 menjadi bahan perbaikan untuk tahun anggaran berikutnya agar tidak mengulangi ataupun dapat meminimalisir kesalahan yang sama sehingga ada perbaikan kinerja pengelolaan keuangan daerah di tahun mendatang.
4. Pemerintah Kabupaten/Kota harus menyesuaikan KUA PPAS berbasis KEM PPKF dengan hasil evaluasi KUA PPAS berbasis KEM PPKF yang telah dilakukan oleh Provinsi bersama Kanwil DJPB Provinsi NTT.
5. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah mengarahkan pemerintah kabupaten Manggarai Barat, Sabu Raijua dan Sumba Barat Daya agar hal-hal yang menjadi koreksi dalam hasil evaluasi Ranperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 menjadi bahan perbaikan untuk tahun anggaran berikutnya agar

tidak mengulangi ataupun dapat meminimalisir kesalahan yang sama sehingga ada perbaikan kinerja pengelolaan keuangan daerah di tahun mendatang.

6. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah mengarahkan Pemerintah Kabupaten Malaka, TTS, Rote Ndao, Sumba Barat, Alor, Sikka, Sumba Timur, Ende dan Kabupaten Kupang agar hal-hal teknis yang menjadi koreksi dalam Hasil evaluasi Ranperda Pertanggungjawaban TA 2024 menjadi bahan perbaikan untuk tahun anggaran berikutnya agar tidak mengulangi ataupun dapat meminimalisir kesalahan yang sama sehingga ada perbaikan kinerja pengelolaan keuangan daerah di tahun mendatang.
7. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah mengarahkan pemerintah kabupaten Manggarai Timur, Belu, Ngada, Nagekeo dan Sumba Timur agar hal-hal yang menjadi koreksi dalam hasil evaluasi Ranperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 menjadi bahan perbaikan untuk tahun anggaran berikutnya agar tidak mengulangi ataupun dapat meminimalisir kesalahan yang sama sehingga ada perbaikan kinerja pengelolaan keuangan daerah di tahun mendatang.

Untuk Bidang Perbendaharaan:

1. Bidang Perbendaharaan melakukan penginputan data PPPK pada Sim Gaji Taspen untuk proses gaji Juli 2025.
2. Bidang Perbendaharaan berdasarkan surat tugas nomor 000.1.2.3/99/BKUD1.2, Tanggal 29 Juli 2025 bertugas ke OPD lingkup Pemprov NTT untuk menyelesaikan masalah sisa DAK Fisik tahun sebelumnya, Perbendaharaan menyarankan OPD bersurat ke Badan Keuangan Daerah Prov. NTT agar sisa dana dapat di akomodir di Tahun Anggaran 2026.
3. Bidang Perbendaharaan mengingatkan OPD agar segera melakukan penginputan realisasi SP2D, Capaian Output Kegiatan dan Upload Foto pada aplikasi OMSPAN .
4. Demi kelancaran pembaruan system administrasi perpajakan yang efektif maka Bidang Perbendaharaan dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kupang melaksanakan sosialisasi system inti administrasi perpajakan (Coretax) pada tgl 26, 28 dan 29 Agustus 2025 bertempat di Aula Kantor Pajak Pratama Kupang.
5. Bidang Perbendaharaan, 4 (empat) OPD pemegang KKPD, dan Bank NTT yang dipimpin oleh Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan sekaligus Plt. Sekretaris Badan Keuangan Daerah Prov. NTT melakukan rapat evaluasi Penggunaan KKPD pada tanggal 25 Agustus 2025 diruang rapat Badan Keuangan Daerah Prov. NTT, ditemukan berbagai persoalan dan diselesaikan salah satunya dalam bentuk revolving KKPD.

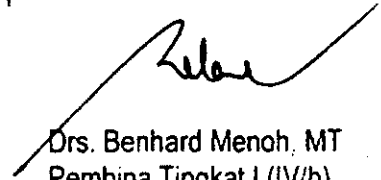
BAB III

PENUTUP

Rapat pembahasan ini dilakukan untuk pemantauan, evaluasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan program/ kegiatan yang telah dilaksanakan Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT Triwulan III Tahun Anggaran 2025. Pelaksanaan rapat diharapkan mampu menghasilkan langkah yang tepat dalam pengolahan serta pemanfaatan pengalokasian anggaran di berbagai segmen kegiatan Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT, serta memperoleh tingkat capaian kinerja yang telah ditetapkan.

Demikian laporan ini disampaikan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan.

9 Kepala Badan Keuangan Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur. 


Drs. Benhard Menoh, MT
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19720512 199101 1 001

LAMPIRAN

- Dokumentasi Rapat





PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

BADAN KEUANGAN DAERAH

Jalan Raya El Tari Nomor 52 Telp. -

Website : bakeuda.nttprov.go.id Email : badankeuanganntt1@gmail.com

NOTA DINAS

Yth : - Sekretaris
- Kabid Perbendaharaan
- Kabid Anggaran
- Kabid Akuntansi dan Pelaporan
- Kabid Pembinaan Keuangan Kabupaten/Kota
Dari : Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT
Tembusan : -
Tanggal : 14 Oktober 2025
Nomor : 000.1.5/2260/BKUD1.2
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Undangan

ISI NOTA DINAS

Dalam rangka pelaksanaan Evaluasi Kinerja dan Pemantauan Tingkat Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT sampai dengan Triwulan III, maka disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

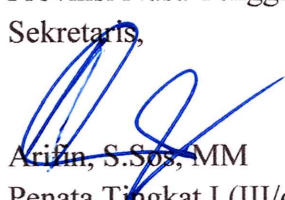
1) Diminta kehadirannya dalam rapat bersama yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 14 Oktober 2025
Waktu : 16.00 WITA s/d selesai
Tempat : Ruang Rapat Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT (Lantai dasar)
Agenda : Laporan Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT sampai dengan Triwulan III;

2) Mengingat pentingnya rapat ini, kami sangat mengharapkan kehadiran seluruh Pejabat Pengawas dan Fungsional pada rapat dimaksud.

Demikian untuk dilaksanakan, atas perhatian dan kehadirannya disampaikan terima kasih.

a.n. Kepala Badan Keuangan Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Sekretaris,


Ari Zin, S.Sos, MM

Penata Tingkat I (III/d)

NIP. 19770707 200501 1 022

Paraf Hirarki	
Kasubag Kepegawaian dan Umum	
Pranata Komputer Ahli Pertama	

DAFTAR HADIR

Kegiatan : Sosialisasi Aktifitas Fisik di Instansi Pemerintah Provinsi NTT

Hari/Tanggal : Rabu, 10 Desember 2025

Instansi : Badan Keuangan Daerah

No	Nama/NIP/NIPPK	Jabatan	No HP	Tanda Tangan
1				
2				
3				
4	Oktovianus Saka	Staf	081338106159	
5	Klau Marini G Surotha	Staf	085239039200	
6	Febriana Mone	Staf	082247467792	
7	yohanes paulus ngilo	Staf	082145 222 887	
8	Asran Irawan Sande	Staf	081.339.364.891	
9	Jabdenur Kanda	Staf	081353771017	
10	Ester Mana v.v. De Jesus	Staf	085 239 341069	
11	Ruth Kanaya	staf	085 339 418 692	
12	Asthir Dethan	mahasiswa	0813 3861 0282	
13	Carla Pereira	staf	082342171423	
14	NENCYLIA C HADAPU	—	08113827133	
15	Semarch Dewi A. P. Bida	staf	081284665586	
16	Matta Meo	staf	082144285849	
17	Subery Subekyanawati	Staf	085829777500	
18	Anselonus Bhuir	Staf	081776043242	
19	Idwina Lamabawa	Staf	081 212 411 878	
20	Juliana S Meale	Staf	082 237 471525	
21	Muhammad Spahn	Staf	0821 604 6097	
22	Yanuario Dhalu	Staf	082247386271	
23	Luki Angi	Staf	08573842 9815	
24	Adel Maing	Staf	082146103699	
25	Kahana Wedu	Staf	08	
26	Siti M. Murya	Staf	08224783 9555	
27	Ruthi Permata Kanaya	Staf		
28				
29				
30				

No	Nama/NIP/NIPPK	Jabatan	No HP	Tanda Tangan
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				



LAPORAN RAPAT EVALUASI TRIWULAN I DAN TRIWULAN IV TAHUN 2025

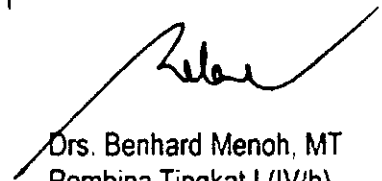
BADAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI NTT



KATA PENGANTAR

Puji Syukur patut kita Panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya, kami dapat menyelesaikan Laporan Rapat Evaluasi Triwulan IV dengan baik. Adapun maksud penyusunan laporan ini adalah memberikan informasi kinerja periode Triwulan IV Tahun 2025 pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Informasi tersebut berupa capaian Program, Kegiatan, maupun Sub Kegiatan serta anggaran. Kami berharap laporan ini dapat memberikan wawasan yang berguna bagi pihak-pihak yang terlibat. Besar harapan Kami hasil evaluasi yang membangun agar Pelaporan Kinerja Kami menjadi lebih baik di triwulan – triwulan berikutnya.

9 Kepala Badan Keuangan Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur.



Drs. Benhard Menoh, MT
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19720512 199101 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 mengenai Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Badan Keuangan Daerah ditetapkan sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan yang menjadi kewenangan daerah.

Dalam menjalankan peran strategis tersebut, Badan Keuangan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Struktur ini menegaskan pentingnya peran Badan Keuangan Daerah dalam mendukung sistem pemerintahan daerah, khususnya dalam aspek pengelolaan keuangan yang efisien dan akuntabel.

Sebagai pelaksana fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang keuangan, Gubernur melalui Badan Keuangan Daerah menyelenggarakan berbagai tugas dan fungsi teknis yang bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang efisien, transparan, dan akuntabel. Adapun tugas dan fungsi dimaksud meliputi:

1. Penyusunan kebijakan teknis di bidang keuangan daerah;
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang keuangan daerah;
3. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang keuangan daerah;
4. Pembinaan teknis terhadap penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang keuangan daerah; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dengan kedudukan, tugas pokok, dan fungsi tersebut, Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki peran penting dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang baik (good governance) serta pengelolaan keuangan yang profesional, efisien, dan akuntabel.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya secara optimal, Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Tahun Anggaran 2025 telah

menetapkan berbagai program dan kegiatan. Pelaksanaan program/kegiatan tersebut bertujuan untuk mendukung pencapaian target pembangunan daerah, khususnya pada aspek pengelolaan keuangan dan peningkatan pelayanan publik di bidang keuangan.

Sebagai bentuk akuntabilitas dan pertanggungjawaban pelaksanaan program/kegiatan, Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur menyelenggarakan Rapat Evaluasi Kinerja Triwulan IV 2025. Tujuan utama dari rapat ini adalah:

- Mengevaluasi capaian **realisasi pendapatan dan anggaran** hingga akhir November 2025.
- Mengidentifikasi **kesenjangan (defisit/selisih)** antara target dan realisasi anggaran.
- Membahas **kendala dalam pengelolaan pendapatan daerah**, termasuk pada komponen PAD dan transfer.
- Merumuskan **langkah percepatan dan strategi optimalisasi realisasi anggaran** menjelang akhir tahun.
- Menyusun **kesimpulan dan saran tindak lanjut** untuk perbaikan kinerja keuangan daerah.

Dengan adanya evaluasi Triwulan ini, diharapkan seluruh perangkat kerja dalam lingkup Badan Keuangan Daerah dapat bekerja secara terarah, terukur, dan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah, serta mendukung tercapainya tujuan pembangunan daerah yang efektif dan berkelanjutan.

B. DASAR HUKUM

- a. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- e. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 Nomor 006, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0130);
- f. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 95 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 Nomor 095);

C. TUJUAN

Tujuan pelaksanaan rapat yaitu pemantauan, evaluasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang telah dilaksanakan periode Triwulan IV Tahun 2025, selain itu tujuan dari dilakukan monitoring dan evaluasi kinerja dan anggaran bertujuan untuk:

- 1. Sebagai bentuk komitmen Pimpinan untuk memastikan bahwa setiap indikator kinerja dapat dicapai secara efektif dan terukur,
- 2. Untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan setiap indikator kinerja yang ditetapkan,
- 3. Untuk mengetahui apakah rencana kerja dan anggaran Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT berjalan efektif sesuai dengan target yang telah ditetapkan,
- 4. Sebagai bentuk pengendalian dan kontrol terhadap pencapaian tujuan dan sasaran.

D. HASIL YANG DIHARAPKAN

Hasil yang diharapkan dari pelaksanaan rapat pembahasan kinerja yaitu pelaksanaan program/ kegiatan dapat terarah, tepat dan diharapkan mampu menghasilkan langkah yang tepat dalam pengolahan serta pemanfaatan pengalokasian anggaran di berbagai segmen kegiatan Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT, serta memperoleh tingkat capaian kinerja yang telah ditetapkan.

E. PEMBIAYAAN

Pembiayaan pelaksanaan kegiatan ini bersumber dari APBD Provinsi NTT TA.2025 pada DPPA Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT Tahun Anggaran 2025.

BAB II

PELAKSANAAN KEGIATAN

A. PESERTA RAPAT

Peserta rapat pembahasan rapat kinerja triwulan Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT Tahun 2025 melibatkan masing-masing unit kerja pada Badan Keuangan Daerah yang terdiri dari:

1. Kepala Badan
2. Sekretaris Badan
3. Kepala Bidang
4. Kepala Sub Bidang
5. Kepala Sub Bagian
6. JFT
7. Pelaksana

B. TEMPAT DAN WAKTU PELAKSANAAN

Rapat pembahasan kinerja Triwulan IV Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT Tahun 2025 dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 3 Desember 2025 yang bertempat di Ruang Rapat Lantai 1 Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT.

C. METODE PELAKSANAAN

Metode yang digunakan adalah berupa pemaparan realisasi serta diskusi untuk memperoleh solusi dan upaya pemecahan permasalahan yang ada.

D. PEMBAHASAN DALAM RAPAT

Dalam pelaksanaan rapat ini dipimpin oleh Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT, dimana pelaksanaan rapat memaparkan beberapa pokok pembahasan yakni:

1. **Kondisi:**
 - Realisasi pendapatan & belanja belum optimal (belanja $\pm 89\%$)
 - Terdapat sisa anggaran pada beberapa komponen & bidang
2. **Permasalahan:**
 - Keterbatasan waktu (SP2D GU)
 - Kendala administrasi (SK Bantuan Keuangan)

- Gangguan sistem & sarana (server/komputer)

3. Fokus Pembahasan:

- Percepatan realisasi anggaran akhir tahun
- Prioritas pembayaran (gaji, tunjangan, honor, lembur)
- Optimalisasi sisa anggaran & penanganan bantuan keuangan

4. Arah Tindak Lanjut:

- Percepatan GU & penyelesaian administrasi
- Penguatan koordinasi lintas pihak
- Prioritas belanja strategis & kebutuhan operasional

(Notulen rapat terlampir)

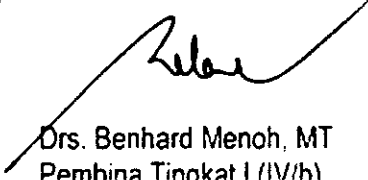
BAB III

PENUTUP

Rapat pembahasan ini dilakukan untuk pemantauan, evaluasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan program/ kegiatan yang telah dilaksanakan Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT Triwulan IV Tahun Anggaran 2025. Pelaksanaan rapat diharapkan mampu menghasilkan langkah yang tepat dalam pengolahan serta pemanfaatan pengalokasian anggaran di berbagai segmen kegiatan Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT, serta memperoleh tingkat capaian kinerja yang telah ditetapkan.

Demikian laporan ini disampaikan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan.

9 Kepala Badan Keuangan Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur.



Drs. Benhard Menoh, MT
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19720512 199101 1 001

LAMPIRAN



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

BADAN KEUANGAN DAERAH

Jalan Raya El Tari No. 52 Kupang 85111

Telepon : (0380) 833145 - 832711

NOTULA

Sidang / Rapat : Rencana Percepatan Realisasi Anggaran pada Badan Keuangan Daerah
Provinsi NTT TA. 2025

Hari/Tanggal : Rabu, 03 Desember 2025

Tempat : Ruang Rapat Badan Keuangan Daerah
Lantai I Gedung Sasando Kantor Gubernur NTT

Surat Undangan :

Waktu Sidang/Rapat : 09.00 Wita

Acara :

1. Pembahasan dan Diskusi
2. Kesimpulan dan Saran

Ketua : Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT

Sekretaris : Sekretaris Badan

Pencatat : Semarch Dewi Ayu Putri Bida, SE

Peserta Rapat :

- ❖ Bapak Arifin, S.Sos.,MM
- ❖ Bapak Heronimus Hayantowati, S.Fil.,MM
- ❖ Ibu Vebby Rycke Saba, SE
- ❖ Ibu Maria Selvyana Lalu Beo, SE
- ❖ Ibu Patricia Maria Arthania, SE
- ❖ Ibu Vincentia Nona, SE
- ❖ Bapak Yakobis Dano, SE
- ❖ Ibu Dra. Yenny C.M. Izaac, M.Si
- ❖ Bapak Yohanis Baptista Eko Prasetyo, SE
- ❖ Bapak Paulus Laurenst Sodak, S.Pi.,MM
- ❖ Katiana T. Wadu, S.Kom
- ❖ Wilson Mone
- ❖ Endrayati
- ❖ Sisi M. Nuryah, S.Mat
- ❖ Andri M. Mboik, S.Tr.M

A. Diskusi dan Pembahasan

Rapat dibuka oleh Sekretaris Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak Arifin, S.Sos.,MM sebagai pengantar untuk masuk dalam inti rapat terkait Realisasi Anggaran pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT Tahun Anggaran 2025.

- Penyampaian materi dari **Bapak Yohanis Baptista Eko Prasetyo, SE** selaku Kasubag Keuangan:

- ❖ Realisasi Pendapatan per tanggal 30 November 2025 mencapai Rp. 2.941.731.941.276,55 dari anggaran Rp. 3.433.606.365.725. Ada pergeseran yang cukup besar pada Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan yaitu dari anggaran Rp. 62.519.178.857 dan terealisasi hanya sebesar Rp. 46.212.172.247. Di Lain-lain PAD yang sah dari anggaran Rp. 57.000.000.000, baru terealisasi Rp. 16.600.797.175,55. Dari Pendapatan Transfer masih terdapat defisiensi sebesar ± Rp. 436 M, dan Di Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terjadi kelebihan realisasi sebesar Rp 930.113.500 yaitu dari anggaran Rp. 202.011.347.868 terealisasi sebesar Rp. 202.941.461.368.
- ❖ Untuk Realisasi Belanja sebagai SKPD, pagu secara keseluruhan untuk Sekretariat dan 4 bidang Rp.35.523.743.676,00, realisasi s/d 25 November 2025: Rp. 25.613.606.446. Harapannya untuk 1 bulan kedepan yaitu bulan desember realisasi belanja Rp 6.140.266.963 sehingga kemungkinan total keseluruhan sampai desember sebesar Rp 31.753.873.409 atau 89,15%. Realisasi Belanjanya tidak bisa mencapai 90% dikarenakan beberapa hal salah satunya di bagian penyediaan gaji ada sisa sebesar Rp. 3.769.870.267 yang tidak bisa dibelanjakan. Sedangkan untuk kegiatan lainnya akan diusahakan untuk terealisasi sebesar 99%.
- ❖ Untuk realisasi belanja sebagai PPKD, pagunya Rp 768.804.172.401. untuk kondisi sekarang, pada bidang anggaran dari anggaran sebesar Rp9,3M baru terealisasi per tanggal 25 November sebesar 69,15% atau senilai 6 M lebih masih ada sisa sebesar Rp 2,8 M. Ini yang harus dikejar periode bulan desember. Bidang AKK, dari anggaran sebesar ±2,1 M, realisasi per 25 november 2025 sebesar ±1,654 M atau 77,68 % masih tersisa 470 Juta yang harus realisasi di bulan Desember. Pada bidang Perbendaharaan anggaran sebesar ±1,9 M realisasi per 25 November 2025 sebesar 1,5 M masih tersisa ±450 Juta yang harus diselesaikan pada bulan desember. Bidang Akuntansi dan Pelaporan, anggaran sebesar 2,9 M terealisasi 2,1 M atau 74,44% masih tersisa 740 juta yang harus diselesaikan pada bulan desember.
- ❖ Untuk belanja lembur, ada beberapa bidang yang periode lemburnya lebih dari 2 minggu. Ini menjadi perhatian karena bagian keuangan juga punya batas waktu untuk pengajuan SP2D GU terakhir, sehingga mohon arahan dari pimpinan terkait hal tersebut.
- ❖ Anggaran untuk Perjalanan Dinas dan belanja cetak masih tersisa anggaran cukup besar sehingga mohon pertimbangan dari pimpinan. Untuk TPP telah diproses sampai dengan bulan Oktober sehingga tersisa 2 bulan yaitu November dan Desember.
- ❖ Terkait Bantuan Keuangan Nagekeo, gambaran mengenai prosedur pencairannya yaitu pertama adanya permintaan Bantuan dari Kab. Nagekeo, setelah itu proses persetujuan dari Gubernur dan didisposisikan untuk ditetapkan dalam Surat Keputusan. Berdasarkan Surat Keputusan itu kemudian TAPD menyampaikan informasi kepada Pemerintah Kab. Penerima. Dari informasi dan SK yang ada baru kemudian pemerintah Kab. bisa mengajukan permohonan pencairan. Jadi

dasar dari permohonan pencairan adalah Pemberitahuan dari TAPD dan SK Gubernur. Jika SK belum ada, sementara permohonan pencairan sudah ada maka ditakutkan akan menjadi masalah dalam pemeriksaan atau penemuan BPK.

- ❖ Jika tidak menunggu sampai SK Gubernur ditandatangani maka harus melihat tanggal dari SK tersebut harus mendahului Permohonan Pencairan. Hal teknis seperti ini yang perlu untuk diperhatikan. Kalau terkait eksekusi kami hanya menunggu arahan pimpinan jika sudah oke maka akan diproses.
 - ❖ Di tahun 2026, atas ijin pimpinan diharapkan agar PDE dapat ikut terlibat dalam proses penganggaran SKPD sehingga disaat menghadapi pihak lain/stakeholder lain yang berkaitan langsung kami dapat mempertanggungjawabkan anggaran tersebut.
 - ❖ Batas pengajuan SP2D GU tanggal 22 Desember 2025. Tidak bisa lagi melakukan GU diatas tanggal tersebut. Sehingga di mohon sisa anggaran 7M yang ada kalau bisa tiap-tiap bidang segera melakukan GU untuk dibayarkan anggaran ± 6 M.
 - ❖ Telah disiapkan dana yang cukup besar untuk pemeliharaan komputer sehingga jika ada komputer yang jebol maka bisa diinformasikan untuk diperbaiki. Peremajaan komputer memang perlu, namun jika telah dianggarkan untuk biaya pemeliharaan maka silahkan untuk digunakan.
- Penyampaian dari Bapak **Arifin, S.Sos.,MM** selaku Sekretaris Badan :
 - ❖ Untuk realisasi per bidang akan diusahakan sampai 95%. Untuk belanja honorarium pada bidang anggaran, bidang akunlap dan bidang perbendaharaan akan dibayarkan sebelum tanggal 31 desember. Belanja lembur kemungkinan akan ada yang dibayarkan secara manual. Untuk belanja cetak, akan diusahakan realisasinya 99,99% karena keperluan Badan Keuangan ini banyak yang belum dipenuhi.
 - ❖ Terkait pencairan TPP bulan November sedang dalam proses menunggu Predikat Kinerja dan nilai kehadiran dari BKD dan jika sudah dikeluarkan oleh BKD maka hari ini juga akan segera diproses pencairan.
 - ❖ Untuk realisasi Badan Keuangan sendiri, jika tidak dihitung dengan pembayaran gaji maka persentasi realisasi belanja sudah mencapai 98,99% karena masih ada sisa gaji sebesar 3,6 M yang belum cair.
 - ❖ Untuk anggaran Perjalanan Dinas setiap bidang sudah selesai terealisasi, namun penginputan di aplikasi masih mengalami gangguan.
 - ❖ Untuk Bantuan Keuangan untuk Kabupaten/Kota sesuai dengan arahan Bapak Kepala Badan untuk berkoordinasi dengan Bapak Okto dari Bapenda karena masih banyak hutang kita yang harus dibayarkan kepada mereka.
 - ❖ Sekretariat sementara membuat Draft Pergub untuk Pembentukan Tim Penyelesaian TPTGR. SKPD yang terlibat dalam tim TPTGR adalah Biro Hukum, Biro Administrasi, Badan Pendapatan dan Aset Daerah, dan jika mengikuti saran dari Bapak Kabid AKK maka ditambahkan Kejaksaan namun harus menyiapkan honor bagi mereka.
 - ❖ Untuk Belanja Modal, adapun permintaan untuk pengadaan kursi kerja yang lebih baik/ nyaman saat bekerja.
 - ❖ Sub bagian PDE memiliki tugas dan fungsi untuk melakukan pembagian anggaran pada setiap bidang. Namun pada kenyataannya PDE tidak mengetahui pembagian anggaran di bidang –

bidang. Untuk itu diharapkan bisa bekerja sama dengan PDE terkait pembagian anggaran pada tiap bidang untuk diketahui bersama.

- ❖ Bantuan Keuangan untuk Kab. Nagekeo sedang menunggu proses SK di Biro Hukum, jika SK sudah ada maka akan diproses untuk pencairannya.

- Penyampaian dari Bapak **Benhard Menoh, MT** selaku Kepala Badan Keuangan :

- ❖ Anggaran Bantuan Keuangan akan dipakai untuk membantu masyarakat yang terkena musibah Banjir Bandang di Provinsi Aceh, Sumatera Barat dan Sumatera Utara sekitar 1,5-2 M sehingga realisasi untuk BTT akan naik meskipun tidak banyak. Begitupun dengan Kab. Nagekeo yang juga akan mendapat bantuan keuangan ± 100 Juta. Sehingga segera dibuatkan SK dan berikan kepada biro Hukum agar bantuan keuangan dapat segera dicairkan. Bantuan Keuangan juga disiapkan untuk MBG namun belum ada informasi lebih lanjut sehingga dana tersebut akan terbawa menjadi Silpa di tahun depan. Dana BTT mungkin tetap karena tergantung dengan adanya bencana, menunggu usulan dari Dinas Sosial dan Badan Bencana karena mereka yang akan mengelolah dan mempertanggungjawabkan dana ini.
- ❖ Untuk Dana Bagi Hasil, harapannya hari ini dapat berkoordinasi dengan Pak Okto dari Bapenda untuk segera mendapatkan berita acara, dan jika ada kendala terkait surat dari Ibu Sekda maka akan saya upayakan untuk dapat dipercepat sehingga angka realisasinya juga dapat naik.
- ❖ Saat ini terdapat pembayaran gaji di beberapa SKPD yang kekurangan pengangggaran. Harus ingat bahwa belanja gaji dan tunjangan sifatnya adalah mendesak, wajib dan terikat. Tidak ada alasan untuk kita tidak membayarkan.
- ❖ Khusus berkaitan dengan program dan kegiatan Badan Keuangan Daerah, khususnya lembur, SPK lembur selesai tanggal 29 Desember 2025. Dan usahakan untuk membayar sebelum tanggal 30 Desember 2025. Untuk Honorarium, jika ada yang bisa dibayarkan sekarang segera untuk dibayar. Administrasi yang harus ditandatangani dimohon agar semuanya ditandatangani. Ada beberapa honor yang belum bisa untuk dibayarkan sekarang seperti di Bidang AKK yang harus selesai evaluasi terlebih dahulu. Untuk Perubahan dan Pertanggungjawaban honornya sudah bisa dibayarkan untuk itu segera untuk disiapkan admnistrasinya dan diproses.
- ❖ Pembayaran Honorarium sesuai dengan Perpres No. 72 Tahun 2025.
- ❖ Untuk anggaran perjalanan dinas, tolong dihitung dengan cermat dan tolong siapkan sedikit anggaran perjalanan dinas untuk Kepala Badan, menjaga sewaktu-waktu diundang untuk menghadiri kegiatan.

- Penyampaian dari Bapak **Heronimus Hayantowati, S.Fil.,MM** selaku Kabid AKK :

- ❖ Mengenai Pendapatan Badan Keuangan Daerah, khususnya di Lain-lain PAD yang sah, yang paling terbesar adalah dari TPTGR. Jika masih banyak pihak ketiga yang belum mengganti kerugian maka disarankan bekerja sama dengan kejaksaan untuk memperlancar proses penagihan. Namun permasalahan jika melibatkan Kejaksaan adalah adanya hal-hal yang menjadi temuan sehingga perlu untuk diusut.
- ❖ Terkait Server yang ada di Badan Keuangan, ruang server yang saat ini digunakan tidak safety. Ruangan server seharusnya full AC. Untuk itu diharapkan kedepan untuk dapat membangun ruang server yang aman.

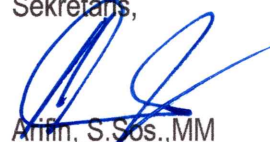
- ❖ Mengenai Belanja Modal, di bidang-bidang dan Sekretariat masih membutuhkan beberapa perangkat penunjang seperti komputer baru untuk mengganti komputer- komputer yang sudah tidak layak dipakai. Karena tahun depan sudah tidak ada anggaran untuk Belanja Modal sehingga diperlukan revisi untuk belanja tahun depan agar prioritaskan pada belanja modal. Contoh kasus yang terjadi pada Bidang AKK, dimana Evaluasi Kab/Kota dibatasi oleh waktu yang ditentukan namun dalam proses persiapan terkendala dengan beberapa komputer yang rusak sehingga membuat proses evaluasi terhambat karena harus dibawa untuk diperbaiki. Jika harus dilakukan perbaikan terus menerus maka menghabiskan biaya yang lebih besar untuk itu jika bisa revisi RKA 2026 , maka lakukan revisi saja untuk prioritaskan pengadaan komputer baru.
 - ❖ Program dan kegiatan di Bidang AKK, ada beberapa yang belum terealisasi. Akan diselesaikan sampai tanggal 30 Desember 2025. Kab/Kota yang telah dievaluasi, SK Evaluasi akan segera dibuat dan dikirim ke Kab/Kota tersebut.
- Penyampaian dari Ibu **Vebby Rycke Saba, SE** selaku Kasubid Pembayaran Bidang Perekonomian dan Pembangunan :
 - ❖ Untuk Bidang Perbendaharaan, terkait realisasi belanja sampai dengan akhir desember bisa mencapai 99%
 - ❖ Terkait TPP, untuk Periode Bulan Oktober, Badan Keuangan merupakan yang paling pertama menerimanya. Diharapkan untuk bulan November dan desember juga demikian.
 - ❖ Terdapat 8 OPD yang mengalami kekurangan gaji sebesar 264 Juta. yaitu BKD, Bapperida, Inspektorat, Ketenagakerjaan, Disperindag, Badan Perbatasan, Dinas peternakan dan Badan Penghubung. Yang menjadi perhatian adalah dari Inspektorat karena mengalami kekurangan gaji pokok dari JKK dan JKN sebesar Rp 258 Juta. Untuk itu jika Badan Keuangan mengalami kelebihan $\pm$ 3M untuk bisa dialihkan.
 - ❖ Menyetujui untuk dibentuk tim TPTGR, dan harus berkoordinasi dengan Inspektorat.
 - ❖ Bidang Perbendaharaan untuk lembur sampai dengan 29 Desember 2025.
 - Penyampaian dari Ibu **Patricia Maria Arthania, SE** selaku Kasubid Akuntansi Belanja, Aset, Hutang dan Pengeluaran Pembiayaan :
 - ❖ Bidang Akunlap sedang menjalan lembur, untuk perjalanan dinas sedang berlangsung diluar kota yaitu Yogyakarta (Bapak Kabid bersama beberapa staf), dan untuk dalam kota akan dilaksanakan dalam minggu ini. Untuk lembur belum dibayarkan Triwulan IV.
 - ❖ Dan untuk belanja, disisakan untuk belanja Makan dan Minum untuk Tim Pemeriksa di bulan Desember.
 - Penyampaian dari Ibu **Dra. Yenny C.M. Izaac, M.Si**, selaku Pejabat Fungsional Bidang AKK:
 - ❖ Menambahkan informasi terkait dengan Bantuan Keuangan Nagekeo, dimana berdasarkan koordinasi dengan Kab. Nagekeo, usulan pertama Surat Permohonan Bantuan Keuangan mengalami kesalahan pada pos BTT sehingga telah berkoordinasi kembali dan telah diganti menjadi pos Bantuan Keuangan. Disamping surat permohonan itu, ada juga RKBnya dan telah disampaikan kepada Pak Jamal selaku Bendahara.

- ❖ Untuk surat pencairan, telah dibuatkan surat pencairan oleh Kab. Nagekeo dan kami telah memfasilitasinya untuk disampaikan kepada pak Jamal selaku bendahara. Jadi tinggal eksekusi saja karena secara administrasi telah dipenuhi oleh kab. Nagekeo.
 - ❖ Jika tanggal pada Surat Permohonan Pencairan mendahului dari SK Gubernur maka akan dikomunikasikan kembali dengan Bupati Nagekeo untuk merubah tanggalnya.
- Penyiampaian dari ibu **Maria Selvyana Lalu Beo, SE**, selaku Kasubid Penyusunan Anggaran Bidang Perekonomian dan Pembangunan :
 - ❖ Terkait Bantuan Keuangan untuk Kab. Nagekeo, masih menunggu SK dari Biro Hukum sampai dengan ditandatangani oleh Gubernur. Namun sesuai dengan arahan Bapak Kepala Badan Keuangan untuk tidak perlu menunggu sampai dengan ditandatangani oleh Gubernur. Jadi dikembalikan lagi kepada pimpinan untuk mekanismenya karena sebagai pelaksana hanya mengikuti arahan dari pimpinan.
 - ❖ Terkait gaji dan tunjangan, untuk kekurangan gaji di beberapa SKPD, Bidang Anggaran telah melakukan pergeseran setelah perubahan, namun masih ada juga beberapa SKPD yang bersurat perihal kekurangan gaji, sehingga masih perlu untuk dikoordinasikan kembali dengan SKPD mungkin perlu dilakukan Pergeseran ke II setelah perubahan.
 - ❖ Terkait Pembagian pagu anggaran untuk tahun anggaran berikutnya biasanya menggunakan pagu anggaran tahun ini karena belum diketahui pastinya. Dan untuk pembagian anggaran antar Bidang-bidang dalam Badan Keuangan sendiri mungkin perlu didiskusikan pada level pimpinan karena kami hanya menyesuaikan.

B. Kesimpulan

1. Realisasi pendapatan dan belanja Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT TA 2025 masih perlu dikejar secara optimal hingga akhir Desember 2025, dan untuk realisasi belanja dapat mencapai 99,98%.
2. Seluruh bidang diminta melakukan percepatan realisasi anggaran yaitu honorarium, dan lembur, khususnya melalui mekanisme GU sesuai batas waktu yang ditetapkan.
3. Pencairan Bantuan Keuangan atau BTT dilaksanakan setelah kelengkapan administrasi terpenuhi dan sesuai arahan pimpinan.
4. Diperlukan peningkatan koordinasi antar bidang serta pelibatan Sub Bagian PDE dalam perencanaan dan penganggaran guna meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Mengetahui,
a.n. Kepala Badan Keuangan Daerah
Sekretaris,



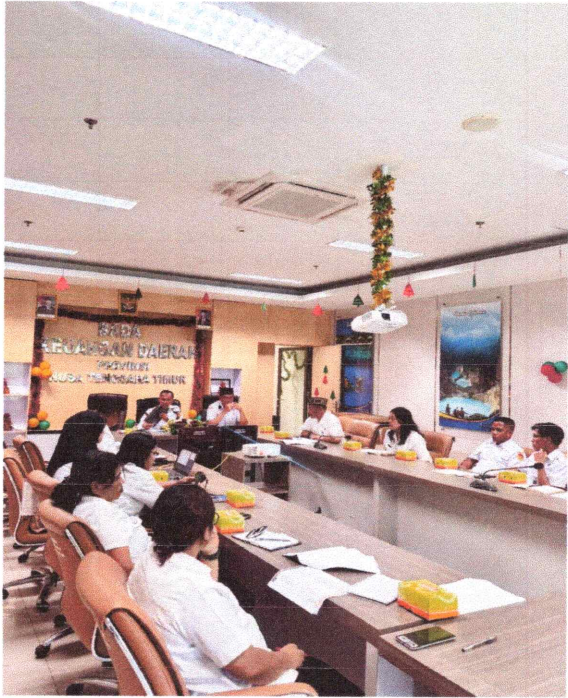
Arifin, S.Sos.,MM

Pembina (IV/a)

NIP. 19770707 200501 1 022

Paraf Hirarki	
Kasubag Keuangan	
Perencana Ahli Pertama	

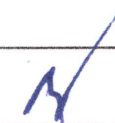
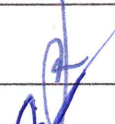
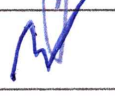
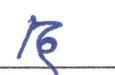
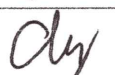
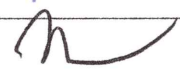
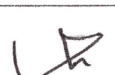
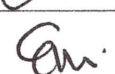
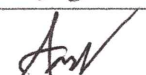
LAMPIRAN



DAFTAR HADIR RAPAT

Kegiatan : Rencana Percepatan Realisasi Anggaran pada Badan Keuangan Daerah TA. 2025

Hari/Tanggal : Rabu, 03 Desember 2025

No	Nama	Paraf
1		
2	Benhard Menoh, MT	
3	Heronimus Hayantowati	
4	Arifin	
5	PEPY S. DAK	
6	Eko Prasetyo	
7	Tenny. C. M. Izrae	
8	Vincentia Alina	
9	Patricia Maria Anthania	
10	Veby P. Saba	
11	Yakobis Dano	
12	Selny L. Beo	
13	Wilson Muni	
14	Endangyah	
15	Kahana T. Wadu	
16	Semarch Dewi A-P. Bida	
17	Geli M. Nungah	
18	Andi Mboke	
19		
20		
21		
22		